

BAB V

SUMBER-SUMBER AUTORITATIF

PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

A. Sumber Autoritatif

“Al-Qur’an dan Al-Hadits”

Para ulama telah sepakat bahwa seluruh permasalahan yang timbul dan dialami manusia dalam kehidupan, sejatinya memiliki *core values* (nilai-nilai asasi) yang telah digariskan di dalam sumber utama Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Bila tidak didapatkan di dalam kedua sumber itu, sesuai dengan hadits Mu’az bin Jabal, dicarikan penyelesaiannya melalui *Ijtihad* sebagai jalan untuk mendapatkan solusi hukumnya.⁶²⁹

Sumber hukum Islam menurut al-Hadits Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hafsu Bin Umar:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW ketika bermaksud mengutus Mu’az ke Yaman bersabda: Bagaimana engkau akan memutuskan hukum jika disodorkan perkara kepadamu?” Muadz menjawab, “Aku akan memutuskan perkara sesuai dengan hukum al-Qur’an (Kitabullah).” “Bagaimana kalau tidak engkau dapatkan di dalam al-Qur’an?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan dengan al-Hadits (al-Sunnah).” “Jika tidak engkau dapatkan di dalam al-Hadits?” Mu’adz kembali menjawab,

⁶²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir*, h. 2.

“Aku akan berjihad sesuai dengan kemampuan akalku dan saya tidak akan mundur. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Mu’az daan berkata : Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan RasulNya sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah,”⁶³⁰

Sumber-sumber hukum Islam menurut al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) ayat 59

adalah sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (al-Hadits), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Demikian itu, sungguh lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶³¹

Merujuk pada keterangan al-Qur’an ini, para ulama menemukan empat sumber hukum Islam, yaitu: taat kepada Allah merujuk pada sumber *al-Qu’an*, taat kepada Rasul-Nya merujuk pada sumber *al-Sunnah* (al-Hadits), taat kepada Ulil Amri merujuk pada sumber *Ijma’*, dan “kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya” merujuk pada sumber *Qiyas*.⁶³² Sebab, *ijma’* merupakan sumber hukum yang berasal dari kesepakatan para ulama atau putusan ulil amri, dan *Qiyas* merupakan analogi hukumnya.⁶³³

Kata-kata “kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya,” para ulama mempersoalkan, “melalui cara apa mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya?

⁶³⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz IX, h. 489.

⁶³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, Juz: V, h. 114.

⁶³² Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir*, h. 35.

⁶³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir*, h. 37.

Bukankah kita sudah memulainya dari al-Qur'an dan al-Hadits?" Lantas, apa yang harus dicarikan lagi dari al-Qur'an dan al-Sunnah? Oleh karena itu, maksud "kembalikanlah kepada al-Qur'an dan al-Hadits" adalah mencari "analogi yang relevan" dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadits. Atau, dengan lain perkataan, mencari sandaran hukum lain yang tidak ada *nash*nya, tetapi tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan al-Hadits, melalui proses penalaran logis berupa *Qiyas*.⁶³⁴

Lepas dari berbagai kontroversi di atas, para ulama sepakat bahwa dalil-dalil hukum, baik di dalam al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', dan al-Qiyas, berfungsi sebagai pedoman untuk menemukan hukum. Jika tidak ditemukan di dalam dua sumber utama itu, ijma' dan qiyas dapat dijadikan sandaran, termasuk berbagai metode penalaran lain yang dirumuskan dan ditemukan oleh para ulama untuk mendapatkan konsep hukum yang mampu menyelesaikan persoalan hidup manusia.⁶³⁵ Sumber-sumber penguatan hukum Islam, secara operatif di dalam syariat Islam, berasal dari *nash* yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, maupun sumber-sumber lain yang dijelaskan sendiri oleh al-Qur'an al-Karim.⁶³⁶

Sumber lain di luar al-Qur'an dan al-Hadits, terutama paling menonjol, adalah ijma' dan qiyas. Posisi Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum, bila menggunakan hadits Mu'az, ia hadir menjadi bagian dari sumber *al-Ra'yu*. Ia hadir bisa dalam bentuk *fatwa*, *fiqh*, dan *qanun*. Sebagian ulama memasukkan *istihsan*, *istishab*, *istislah* (*masalahah mursalah*), *'urf*, *saddudz dzariyat*, dan lain-lain, sebagai rangkain sumber-sumber hukum di dalam Islam.⁶³⁷

⁶³⁴ *Ibid*, h. 38.

⁶³⁵ *Ibid*, h. 219.

⁶³⁶ *Ibid*, h. 219-220.

⁶³⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, *istihsan*, *istishab*, *istislah* (*masalah mursalah*), *urf*, dan lain-lain, menurut penulis, lebih tepat disebut sebagai “metode” (*manhâj*) penalaran hukum Islam, bukan “sumber” (*mashâdir*) hukum Islam. Karena ia tidak menyediakan materi hukum kecuali alat penalaran hukum. Sumber-sumber hukum Islam paling otoritatif, para ulama sepakat tanpa perbedaan adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Adapun *ijma'* dan *qiyas*, sebagai wujud kongkret dari sumber *al-Ra'yu*, di kalangan para ulama fiqh dan ushul fiqh, otoritasnya masih diperdebatkan (*khilafiyah*).⁶³⁸

Oleh karena itu, tatkala bicara tentang sumber-sumber otoritatif dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia, maka ada dua sumber utama: *naqliyah* dan *aqliyah*. Al-Qur'a dan Al-Hadits adalah *sumber naqliyah*. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, UUD 1945 Pasal 29, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUPA No. 7 Tahun 1989/UUPA No. 3 Tahun 2006 adalah *sumber aqliyah*.

Al-Qur'an, sebagaimana para ulama merumuskannya, adalah Kitab Suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril secara *mutawatir* dan membacanya bernilai ibadah.⁶³⁹ Kitab suci ini diturunkan secara berangsur-angsur selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun, melalui dua periode sejarah, yakni periode Makkiah dan periode Madaniyah, berisikan 30 Juz, 114 surat, 6666 ayat.⁶⁴⁰

Kitab Suci al-Qur'an, di samping sebagai *mukjizat* terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, ia juga memiliki tiga fungsi utama: (i) sebagai pedoman hidup

⁶³⁸ *Ibid.*

⁶³⁹ Muhmmad Baqir Hakim, *'Ulûm al-Qur'ân*, Edisi Indonesia dengan judul yang sama oleh, Nashrul Haq, et al, (Jakarta: al-Huda, 2006 M/1427 H), Cet ke-1, h. 3.

⁶⁴⁰ *Ibid.*

bagi umat manusia.⁶⁴¹ Sebagai pedoman hidup manusia, al-Qur'an memiliki 11 fungsi: sebagai *hudan*, *rahmat*, *furqân*, *mau'izhah*, *busyrâ*, *tibyân*, *mushaddiq*, *nûr*, *tafshîl*, *syifâ'u al-shudûr*, dan *hakîm*. (ii) Sebagai koreksi, pembenar, dan penyempurna kitab suci-kitab suci sebelumnya, dan (iii) sebagai pelanjut ajaran *tawhid*—meng-Esa-kan Allah—dari para Nabi dan Rasul sebelumnya: sejak Nabi Adam as hingga Nabi Isa al-Masih.⁶⁴²

Adapun al-Sunnah (al-Hadits) adalah “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun takrir (pengakuan) dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri.”⁶⁴³

Kata *al-Sunnah* sering diidentikkan dengan kata *al-Hadits*. Karena kata *al-Hadits* acap kali digunakan oleh kalangan ahli Hadits dengan maksud yang sama dengan kata *al-Sunnah*, yaitu pengertian yang biasa digunakan oleh kalangan ulama *ushul fiqh*, seperti definisi di atas. Namun, kalangan ulama tertentu, ada yang membedakan *al-Sunnah* dari *al-Hadits*. Karena memang secara etimologis, makna kedua kata itu memang berbeda. Kata *al-hadits* lebih banyak mengarah kepada pengertian tentang “ucapan-ucapan dan pengakuan Nabi saw,” sedangkan kata *al-sunnah* lebih banyak mengarah kepada pengertian tentang “perbuatan dan tradisi hidup Nabi Muhammad SAW.”⁶⁴⁴

Hampir semua ulama, baik ulama *fiqh*, ulama *ushul fiqh*, maupun ulama *hadits*, sepakat bahwa penggunaan kata *al-Sunnah* atau *al-Hadits* itu, hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW, dan tidak digunakan untuk selain dari Nabi Muhammad saw.

56. ⁶⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h. 54-

⁶⁴² Muhmmmad Baqir Hakim, ‘*Ulûm*, h. 187-220.

⁶⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 75.

⁶⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasannya adalah karena beliau sendirilah yang *dinisbatkan* kepadanya sebagai pribadi *ma'shum* (terpelihara dari segala dosa dan salah dalam menyampaikan wahyu Allah). Oleh karena itu, hanya beliau sendirilah yang berhak menyandang gelar itu dan tampil sebagai sumber rujukan dan “teladan terbaik” (*uswatun hasanah*). Maka, apa pun yang disunnahkan, mengikat bagi seluruh umat.⁶⁴⁵

Di sinilah, penulis ingin menegaskan pendirinya bahwa penggunaan al-Qur'an sebagai sumber otoritatif memiliki posisi lebih tinggi daripada al-Hadits. Karena, fungsi al-Hadits ada tiga, seperti dirumuskan para ulama berikut ini: (i) sebagai pengulangan atas hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an; (ii) sebagai penjelasan atau penafsiran hukum yang telah disyariatkan di dalam al-Qur'an; dan (iii) sebagai ‘penetapan hukum baru’ yang belum disinggung secara eksplisit di dalam al-Qur'an.⁶⁴⁶

B. Sumber Otoritatif

“Piagam Jakarta 22 Juni 1945”

Sehari setelah diproklamirkan sebagai bangsa merdeka, para pemimpin terkemuka bangsa ini, mengajukan rancangan Undang-undang Dasar beserta Pembukaannya pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 untuk disahkan sebagai Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.⁶⁴⁷ Ketika *Preamble* itu diajukan, ternyata sudah dikurangi *tujuh kata* yang sudah disepakati oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.⁶⁴⁸ Tujuh kata yang dicoret kemudian menjadi kontroversi itu berbunyi: “*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-*

⁶⁴⁵ *Ibid.*

⁶⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir*, h. 219-234.

⁶⁴⁷ Mohammad Roem, “Tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945,” dalam Sabar Sitanggang (peny.), *Mengapa Tujuh Kata?* (Jakarta: Bina Mitra Wisesa, 2004), Cet. ke-1, h. 8

⁶⁴⁸ *Ibid.*

pemeluknya.”⁶⁴⁹ Sedangkan perkataan “Ketuhanan” sudah pula ditambahkan dengan “Yang Maha Esa,” sehingga rumusan akhir yang disepakati menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁵⁰

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, “Panitia Sembilan” telah dengan susah payah menyepakati sebuah rumusan “jalan tengah” antara dasar Islam dan dasar Pancasila. Kalangan Islam menghendaki dasar Islam, dan kalangan nasionalis menghendaki dasar Pancasila. Maka lahirlah rumusan jalan tengah yang, oleh Mr. Mohammad Yamin, disebut sebagai “Piagam Jakarta” (*The Jakarta Charter*), dan oleh Mr. Ahmad Soebardjo disebutnya sebagai *Gentleman Agreement*. Rumusan Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) yang ditandatangani oleh sembilan tokoh nasional itu, selengkapnyanya berbunyi:

PIAGAM JAKARTA⁶⁵¹

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indo-nesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-nesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu *Hukum Dasar* Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: *Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam*

⁶⁴⁹ *Ibid.*

⁶⁵⁰ *Ibid.*

⁶⁵¹ Yamin, Naskah I, 154: Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945*, (Yogyakarta: 1956), h. 33; Lihat juga, Endang Saifuddin Anshari, “Piagam Jakarta,” dalam Sabar Sitanggang (peny.), *Mengapa Tujuh Kata?*, h. 81-82; Lihat juga, Rika T, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap)*, Naskah Proklamasi, Pancasila, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, Sumpah Pemuda, Supersemar, MPRRI, DPRRI, (Jakarta: Triana Media, 2014), h. 113; B.J. Boland, *The Tsruggle of Islam in Modern Indonesia*, Terjemahan Syaafroedin Bahar, dengan Judul, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985). Rumusan dalam cetak miringdicoret dan diganti.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta me-wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22-06-2605,⁶⁵² atau Jakarta, 22-06-1945

t.t.d.

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdul Kahar Muzakkir
Haji Agus Salim
Mr. Ahmad Soebardjo
Wachid Hasjim
Mr. Mohammad Yamin.

Dilihat dari kata *per* kata dalam rumusan ini, maka rumusan *Pembukaan* Piagam Jakarta dan *Pembukaan* UUD 1945, hanya berbeda secara mendasar pada kata-kata, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*”

Hal ini terjadi karena pada waktu itu, di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, sudah tercapai puncak “kompromi” tentang Piagam Jakarta, sebagai “jalan tengah” dari perdebatan tentang Negara berdasarkan Pancasila atau Negara berdasarkan Islam.⁶⁵³

Menimbang bahwa proses pencapaian itu begitu dirasakan sungguh-sungguh berat dan sulit, atau diperoleh dengan susah payah dalam sidang-sidang sebelumnya, wajarlah ketika tujuh kata itu dicoret—padahal itulah *jiwa* dari Piagam Jakarta—sebagian dari pemimpin Islam merasa *kecewa* dengan putusan singkat tetapi amat menentukan itu. Rumusan *Pembukaan* Piagam Jakarta inilah, pada tanggal 18

⁶⁵²Penulisan angka tahun 2605 dalam *naskah asli* Piagam Jakarta, sama maknanya dengan tahun 1945. Pola penulisan angka tahun demikian karena pada rancangan awal hingga ditandatangani Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, rupanya angka tahun dalam naskah Piagam Jakarta tertulis dengan menggunakan hitungan tahun Jepang (*Syowa*). Tetapi angka itu maknanyasama dengan angka 1945 Masehi. Lihat, Rika T, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap), Naskah Proklamasi, Pancasila, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, Sumpah Pemuda, Super semar, MPRRI, DPRRI*, (Jakarta: Triana Media, 2014), h. 113

⁶⁵³Endang Saifuddin Anshari, “Piagam Jakarta,” dalam, Sabar Sitanggang, (ed.), *Mengapa*, h. 63.

Agustus 1945, setelah tujuh kata itu dicoret, disahkan oleh PPKI sebagai Pembukaan UUD 1945.⁶⁵⁴

Semua ini sudah menjadi kenyataan sejarah, kata Mr. Mohammad Roem. *Takdir* sudah berkata, *ikhtiar* segera berjalan. Sejarah tidak mungkin lagi dikembalikan. Namun, semangatnya akan tetap hidup dan bersemayam di hati sanubari rakyat. Lebih jauh, Mohammad Roem menegaskan, Bagaimanapun perasaan orang, jika sesuatu sudah menjadi sejarah, kita setuju ataupun tidak, suka ataupun terpaksa, tidaklah pada tempatnya kita terus menerus menyayangkan sesuatu, laksana menyayangkan susu yang sudah tertumpah.⁶⁵⁵

Benar, ‘laksana menyayangkan susu yang sudah tertumpah.’ Sebuah *metafora* yang indah. Metafora ini dengan tepat sekali menggambarkan kepada kita tentang betapa *absurd* dan sia-sianya kita terus-menerus menyesali nasi telanjur jadi bubur. “Adalah lebih baik,” kata Kong Fu Tsu, penggagas Confucionisme, “engkau menyalakan sebuah lilin, betapa pun kecilnya, daripada engkau berlarut-larut dalam kegelapan.”⁶⁵⁶

Pesan ini hendak mengingatkan, “Ambillah kesempatan pertama untuk memanfaatkan peluang yang tersisa dan lakukanlah sesuatu untuk memaknai apa yang sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini. Janganlah hanya pandai mengeluh dan mengecam, tetapi juga harus pandai menata dan memaknai. Biar para

⁶⁵⁴Mohammad Roem, “Tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945,” dalam Sabar Sitanggang (peny.), *Mengapa*, h. 8.

⁶⁵⁵*Ibid.*

⁶⁵⁶ Agus Miftah Abegebriel, “Madzhab Islam Kosmopolitan Gus Dur,” dalam Abdur-Rahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007) Cet. ke-1, [pengantar], h. v.

pendiri bangsa ini tersenyum bangga dengan apa yang belum sanggup mereka capai di masa lalu, tetapi generasi penerusnya mampu menggapainya di masa kini.”⁶⁵⁷

Bung Hatta,⁶⁵⁸ beberapa tahun kemudian, di saat menjawab kritik kalangan Islam yang kecewa dengan peristiwa itu, secara khusus menuliskan kesaksiannya tentang momentum historis sekitar proklamasi itu, guna menjernihkan suasana yang mungkin sekali bisa membawa malapetaka bagi bangsa ini ke depan. Beliau terpenggil memberikan penjelasannya sebagai pelaku sejarah, pada detik-detik proklamasi selesai dibacakan.

Pada sore harinya—setelah naskah proklamasi dibacakan (pen.)—saya menerima telepon dari Tuan Nisjidjima, pembantu Admiral Mayeda, menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minorita. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.”⁶⁵⁹

Kata demi kata dari *berita* yang disampaikan oleh opsir Kaigun ini, disimak dengan sangat serius oleh Bung Hatta. Sebab, menurut Bung Hatta, berita ini berkategori “berita sangat penting” bagi keselamatan bangsa dan Negara yang baru saja diproklamirkan itu. Setelah mendengar dengan saksama, Bung Hatta mengajukan keberatan atas tuduhan *diskriminasi* atas golongan *minoritas* yang dialamatkan

⁶⁵⁷ Ahamd Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), Cet ke-2, h. 5-6.

⁶⁵⁸ Mohammad Hatta, “Pembentukan Indonesia Merdeka,” dalam Sabar Sitanggang (peny.), *Mengapa*, h. 1.

⁶⁵⁹ Mohammad Hatta, “Pembentukan Indonesia Merdeka,” h. 1. Banyak kalangan juga meragukan keterangan Bung Hatta ini, dengan alasan bahwa masalah sepenting itu, tanpa melalui penelitian mendalam, Bung Hatta langsung saja *percaya* dengan utusan *Kaigun*, adalah tidak masuk akal. Apalagi peristiwa penting itu tidak ada risalah rapatnya, semakin menimbulkan *kecurigaan* di kalangan Islam. Keterangan lebih lanjut soal penjelasan Bung Hatta yang diragukan kebenarannya itu, silahkan simak ulasan, Yusril Ihza Mahendra, “Proses Penyusunan UUD 1945,” h. 109.

kepada umat Islam, hanya karena dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 kalimat, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”⁶⁶⁰

Bagi Bung Hatta, apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itu, *toh* hanya teruntuk umat Islam. Apalagi proses pencapaiannya itu tidaklah mudah. Malahan, Bung Karno menyebutnya sebagai, “hari-hari yang memecahkan urat syaraf.”⁶⁶¹ Mereka telah berdebat panjang untuk mencapai kesepakatan berat itu. Lantas, mengapa setelah sampai di puncak, tiba-tiba saja ada orang datang hendak membongkar lagi kesepakatan itu? Itu tidak *fair*. Karena sama saja dengan menarik karpet dari balik meja. Segala yang tertata rapi dengan susah payah di atas meja itu, akan segera berantakan bila ada yang menarik karpet dari balik meja itu.⁶⁶² Hal inilah membuat Bung Hatta, kepada opsir Kaigun itu, menegaskan pendiriannya,

*Saya katakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatangani. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun.*⁶⁶³

Rupa-rupanya, penjelasan Bung Hatta itu, tidak membuat opsir Kaigun ini menyerah. Ia malah mengulangi lagi bangunan logika “keberatan” pihak non Islam atas kalimat yang dinilai mengandung diskriminasi itu. Opsir Kaigun ini amat serius meminta perhatian Bung Hatta atas “keberatan” dari wakil pemimpin Kristen Protestan, dan Katolik tersebut. Ia menegaskan:

⁶⁶⁰ *Ibid.*

⁶⁶¹ *Ibid.*

⁶⁶² Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), Cet ke-1, h. 49-50

⁶⁶³ Mohammad Hatta, *Pembentukan*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mungkin waktu itu, Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat tersebut berlaku hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun golongan yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.⁶⁶⁴

Nampaknya, opsir Kaigun itu serius dengan kata-katanya. Bahkan, dia ingin membantu pemimpin Indonesia untuk mencari jalan keluarnya. Sebab, kata-kata, “kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung *diskriminasi* itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik,” diulang-ulangnya sampai dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa gawat dan seriusnya masalah ini.⁶⁶⁵

Pengulangan sebuah kalimat yang dirasa mengganjal, dari perspektif komunikasi politik, bisa mengandung dua makna yang saling bertaut: *tuntutan* sekaligus *ancaman*. Jika *tuntutannya* tidak tercapai, *ancamannya* akan diwujudkan, sebagaimana ditegaskan oleh opsir Kaigun di atas. Maka, setelah mendengar dengan sungguh-sungguh keberatan yang diberikan oleh wakil dari umat Kristen Protestan, dan Katolik melalui utusan Kaigun ini, Bung Hatta mulai berpikir keras, kemudian memberikan penegasannya:

Karena opsir Angkatan Laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan, “bersatu kita teguh bercerai kita jatuh,” perkataannya itu berpengaruh juga terhadap pandangan saya. Tergambar di muka saya perjuangan saya selama lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu dan tidak terbagi-bagi.⁶⁶⁶ Apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi?⁶⁶⁷ Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik *divide et impera*, politik memecah dan menguasai. Setelah saya terdiam

⁶⁶⁴ *Ibid*, h. 2.

⁶⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁶⁷ *Ibid*.

© Hak cipta milik Universitas Islam Sumatera Utara

© Hak cipta milik Universitas Islam Sumatera Utara

© Hak cipta milik Universitas Islam Sumatera Utara

⁶⁷⁰*Ibid.*

pembuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu, dan tidak terpecah-pecah.⁶⁷¹

Di sini, penulis mengambil posisi “mempercayai” keyakinan Bung Hatta bahwa opsir *Kaigun* itu orang yang sungguh-sungguh *tulus*, *empati*, dan *cinta* terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya itu. Meskipun tidak ada *klarifikasi* (penjernihan) dan *verifikasi* (pembuktian) atas *validitas* informasi yang dibawa oleh opsir *Kaigun* tersebut. Tetapi, bagi Bung Hatta, dikarenakan dukungan yang *tulus*, dipadu oleh rasa *empati* dan *cinta* kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita kemerdekaannya itu, membuat keyakinan Bung Hatta menguat. Rupanya, opsir *Kaigun* itu sungguh-sungguh tidak *rela* kalau kemerdekaan baru saja diproklamlirkan itu harus hancur.⁶⁷² Apalagi, kehancuran itu hanya berlandaskan pada “bagian kalimat” yang dirasakan *diskriminatif* oleh para pemimpin Kristen Protestan, dan Katolik, lalu memaksa sebagian elemen bangsa harus memisahkan diri dan memilih berada di luar Republik Indonesia.⁶⁷³

Sangat boleh jadi, Bung Hatta berpikir, kalau opsir *Kaigun* itu saja tidak *rela* melihat bangsa Indonesia hancur berkeping-keping hanya karena urusan “redaksional” yang termuat dalam sebuah *Pembukaan* UUD 1945, apalagi beliau sebagai pendiri bangsa, lebih tidak rela lagi. Oleh karena itu, masuk akal kiranya, beliau terusik juga rasa nasionalismenya ketika diingatkan oleh orang lain tentang “arti penting persatuan” dalam sebuah negara yang baru *setengah hari* lahir itu. Di sini, keterpengaruhan Bung Hatta lebih pada “sentuhan” emosi, idealisme, dan cita-

⁶⁷¹ *Ibid.*

⁶⁷² *Ibid.*, h. 3.

⁶⁷³ *Ibid.*



cita yang sama dari opsir *Kaigun* itu dengan emosi, idealisme, dan cita-cita yang diperjuangkan oleh Bung Hatta dan kawan-kawannya.⁶⁷⁴

Kedua, bahwa dalam situasi terdesak itu, Bung Hatta bertanya ke dalam dirinya, apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Beliau kemudian mengajukan jawaban sendiri, kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik *divide et impera*, politik memecah dan menguasai.⁶⁷⁵

Penulis mencoba membaca arah pandangan Bung Hatta yang terkandung dalam frase ini, “apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi?” Ya, ‘suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi.’ Frase ini penting untuk dicatat, karena dua alasan. *Pertama*, Bung Hatta sejatinya ingin mengatakan bahwa “kemerdekaan dan persatuan” jauh lebih sulit dicapai dibandingkan dengan proses pencapaian Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Kalimat itu, sebenarnya bisa diperbaiki dengan kalimat yang lebih brilian, cerdas, dan *visioner* daripada harus mengorbankan apa yang sudah di tangan. Faktanya, terbukti kemudian bahwa kalimat itu diperbaiki dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu kalimat yang oleh banyak kalangan dipuji sebagai rumusan paling brilian, cerdas, dan *visioner*.⁶⁷⁶ Kalimat inilah kemudian oleh Ki Bagus Hadikusumo, tokoh penting dalam *lobbying* Bung Hatta untuk pencoretan *tujuh kata* itu, mengusulkan dan

⁶⁷⁴ *Ibid.*

⁶⁷⁵ *Ibid.*

⁶⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Tidak Usah Membuka Kotak Pandora*, h. 38.

menegaskannya sebagai “sila Tauhid.”⁶⁷⁷ Kedua, Bung Hatta, nampaknya lebih memilih cita-cita perjuangan syariat Islam melalui *Islam substansif* daripada *Islam formatif*.⁶⁷⁸ Atau, dengan lain perkataan, beliau lebih suka berjuang menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia, dengan menggunakan pendekatan “garam” (terasa tetapi tak terlihat) daripada pendekatan “gincu” (terlihat tetapi tak terasa).⁶⁷⁹

Atas dasar pandangan seperti inilah, Bung Hatta menegaskan visi politik hukumnya secara lebih tajam, dimana pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁸⁰

Penegasan ini menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena mampu meyakinkan hati para pemimpin Islam, sehingga mereka dapat dengan jernih menerima kenyataan itu dengan jiwa besar.⁶⁸¹ Menurut Yusril Ihza Mahendra, ada dua alasan utama mengapa kompromi yang ditawarkan Bung Hatta kepada para pemimpin Islam itu berjalan mulus, malahan sebagaimana pengakuan Bung Hatta, kurang dari 15 menit.

Pertama, karena keadaan yang mendesak pada hari-hari pertama kemerdekaan, ketika rasa persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat harus lebih diutamakan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari ancaman Jepang, yang meskipun sudah kalah perang, masih memiliki persenjataan yang lengkap. Ancaman juga

⁶⁷⁷Mohammad Roem, *Tentang*, h. 11.

⁶⁷⁸Azyumardi Azra, *Islam Substansif*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 145.

⁶⁷⁹Achmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 198.

⁶⁸⁰Mohammad Hatta, *Pembentukan*, h. 3.

⁶⁸¹Yusril Ihza Mahendra, “Proses Penyusunan UUD 1945 dan Peranan Ki Bagus Hadikusumo,” dalam bukunya, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996).

datang dari pihak Belanda, yang telah bersiap-siap mengambil alih lagi wilayah Indonesia yang selama tiga setengah tahun berada di bawah kekuasaan Jepang.⁶⁸²

Kedua, tokoh-tokoh Islam menyadari bahwa UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah UUD Sementara. Soekarno sendiri, sebagai Ketua PPKI, mengingatkan semua anggota PPKI bahwa UUD yang disahkan itu adalah *Undang-undang Dasar Kilat*, suatu *revolutie gondwet*. Nanti, katanya, jika keadaan telah memungkinkan, dibentuk *Majelis Permusyawaratan Rakyat* melalui pemilihan umum. Lembaga inilah yang akan membuat UUD bersifat tetap. Memang, jika disimak, ketentuan dalam *Aturan Tambahan UUD* yang disahkan itu hanya berlaku satu tahun, yaitu dua kali enam bulan setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya.⁶⁸³

Meskipun demikian, menurut Ismail Sunny, Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, saya dapat mengatakan, bahwa dengan ketentuan tujuh perkataan itu saja sama sekali tidak berarti telah terbentuknya Negara Islam dalam Piagam Jakarta. Salah paham waktu itu dapat diatasi kalau saja ada yang mengusulkan ketujuh kata-kata itu menjadi berbunyi,”dengan kewajiban menjalankan ketentuan agama bagi pemeluk-pemeluknya.”⁶⁸⁴

Terlepas dari kontroversi soal pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, lengkap dengan usulan perubahannya di atas, sebenarnya melalui penegasan Bung Hatta tentang posisi Piagam Jakarta dalam Konstitusi Negara di atas, sejak saat itu,

⁶⁸² *Ibid.*

⁶⁸³ *Ibid.*

⁶⁸⁴ Ismail Sunny, “Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional,” *Panjimas*, No. 486, Tahun XXVII, 8 Rabiul Awwal 1406/ 21 November 1985, h. 18.

Piagam Jakarta hadir dalam tata hukum nasional Indonesia sebagai “sumber hukum persuasif” (*persuave source*).⁶⁸⁵

Apalagi penegasan itu, diikuti pula dengan penegasan lainnya, yang menurut hemat penulis, jauh lebih substansif, konseptual, dan strategis, bila dikaitkan dengan makna keseluruhan cita-cita perjuangan umat Islam dalam menerapkan syariat Islam, jika memang—seperti ditegaskan Ismail Sunny—tidak dimaksudkan sebagai upaya mendirikan “Negara Islam” di Indonesia. Penegasan penting ini, disampaikan Bung Hatta:

Dalam Negara Indonesia yang memakai kemudian semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syari’at Islam, yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana Undang-undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syari’at yang teratur dalam Undang-undang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang. Orang tidak perlu mengambil [begitu] saja dari syari’at Islam yang berlaku dahulu di negeri-negeri Arab dalam abad ke-8, ke-9, atau ke-10, yang di waktu itu sesuai pula dengan keadaan masyarakat di situ.”⁶⁸⁶

Dengan mengatakan sikapnya ini, Bung Hatta hendak menegaskan sikap politiknya terhadap prinsip penerapan syariat Islam di Indonesia. Bahwa berjuang menerapkan syariat Islam di Indonesia, tidak perlu menaikkan bendera Islam. Apalagi bendera Islam model negara-negara Arab pada abad ke 8-10 M, jelas tidak relevan.⁶⁸⁷

Di sini Bung Hatta menyumbang satu lagi prinsip perjuangan “membela Islam,” bahwa syariat Islam yang diperjuangkan dengan gigih itu, haruslah diwujudkan secara modern, sejalan dengan tuntutan *ruang* dan *waktu* Indonesia modern, bukan berorientasi pada masa lalu. Dengan penegasan ini, bukan berarti Bung Hatta hendak mengabaikan pendekatan “bendera Islam,” tetapi demi menjaga prinsip, *bersatu kita*

⁶⁸⁵ Juhaya S. Praja, *Pengantar*, h. xi

⁶⁸⁶ Mohammad Hatta, “Pembentukan Indonesia Merdeka,” dalam Sabar Sitanggang (peny.), *Mengapa*, h. 3.

⁶⁸⁷ *Ibid.*

teguh bercerai kita jatuh, atau demi menjaga cita-cita *Bhineka Tunggal Ika* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁸⁸ Maka bijaklah kiranya, perjuangan penerapan syariat Islam itu, dilakukan melalui pendekatan Islam *substansif* (Islam isi) ketimbang Islam *formatif* (Islam bingkai).⁶⁸⁹

Ketiga, bahwa setelah beliau terdiam sebentar, kemudian beliau berjanji kepada opsir *Kaigun* itu bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau akan mengemukakan masalah yang sangat penting itu. Bung Hatta kemudian meminta opsir *Kaigun* ini agar berkenan menyabarkan untuk sementara para pemimpin Kristen Protestan, dan Katolik yang berhati panas dan berkepala panas itu, supaya mereka jangan sampai terpengaruh oleh propaganda Belanda.⁶⁹⁰

Frase ini terasa menarik karena seakan-akan Bung Hatta sangat yakin bahwa dia mampu mengubah pandangan politik para pemimpin Islam yang, dia tahu sendiri, dengan susah payah memperjuangkan anak kalimat yang dirasa menggajal oleh para pemimpin non Islam itu. Keyakinan Bung Hatta ini didorong oleh “nalurnya” sebagai tokoh pejuang bangsa bahwa tidaklah mungkin para pemimpin Islam lebih mementingkan *ego* Islamnya daripada kepentingan besar bangsanya.⁶⁹¹ Dia percaya bahwa, jika diberi penjelasan yang benar, jujur, dan tulus, tentang nasib bangsa ini di masa depan, para pemimpin Islam itu tidak sulit menerimanya. Bahkan bersedia berkorban apa pun juga demi menyelamatkan nasib bangsanya itu.⁶⁹²

⁶⁸⁸*Ibid.*

⁶⁸⁹Azyumardi Azra, *Islam*, h. 76.

⁶⁹⁰Mohammad Hatta, *Pembentukan*, h. 3.

⁶⁹¹Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007). Cet ke-1, h. 46-47.

⁶⁹²*Ibid*, h. 49-50.



Rupanya, Bung Hatta, seakan mencium bau tak sedap “permainan” Belanda di belakang “keberatan” tersebut. Sebab, tidaklah mungkin para pemimpin Kristen Protestan, dan Katolik itu mengajukan “keberatan” tanpa ada yang memanasi-manasi mereka.⁶⁹³ Mengingat, sebagaimana penjelasan Bung Hatta kepada opsir Kaigun bahwa wakil non Islam (Kristen Protestan, dan Katolik) di Panitia Sembilan, Mr. A.A. Maramis, jauh sebelum ini, tidak memiliki keberatan apa-apa tentang masalah ini, bahkan telah ikut pula menandatangani *gentleman agreement* itu, lantas kenapa sekarang keberatan? Inilah yang mendasari *kecurigaan* Bung Hatta atas permainan Belanda, sekaligus mengkhawatirkan bahwa kalau rumusan Piagam Jakarta itu dipertahankan, Belanda akan semakin “gila” meningkatkan propagandanya di wilayah tertentu di Tanah Air, agar kita sebagai bangsa saling mencakar, lalu Belanda yang akan memperoleh keuntungan.⁶⁹⁴

Oleh karena itu, masuk akal kiranya, tokoh asal Minang ini dengan sungguh-sungguh berpesan kepada opsir Kaigun itu agar—sambil menunggu hasil sidang besok—bersedia menenangkan dan menyabarkan hati dan kepala yang panas dari para pemimpin Kristen Protestan, dan Katolik itu, supaya mereka tidak termakan oleh segala *hasutan* atau *propaganda* pihak Hindia Belanda. Karena memang Belanda sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali menjajah Indonesia.⁶⁹⁵

Sayangnya, penulis tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai tentang bagaimana cara Bung Hatta meyakinkan para pemimpin Islam pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 itu. Dan bagaimana gambaran objektif tentang suasana penjelasan itu berlangsung, sehingga mereka dapat dengan mudah menerima penjelasan Bung

⁶⁹³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 29-31.

⁶⁹⁴ *Ibid.*

⁶⁹⁵ Yusri Ihza Mahendra, *Proses*, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hatta yang sangat penting tersebut, hanya dalam hitungan waktu kurang dari 15 menit.⁶⁹⁶ Penulis hanya mendapatkan informasi penting itu dari pengakuan Bung Hatta, bahwa:

Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hassan dari Sumatera, mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu pertanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan negara.”⁶⁹⁷

Merujuk pada keterangan Bung Hatta inilah, Mohammad Roem, dalam sebuah tulisannya, memberi komentar, “Hilangnya tujuh perkataan itu dirasakan oleh umat Islam sebagai kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya. Akan tetapi, karena hilangnya tujuh perkataan itu dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia, maka umat Islam bersedia memberikan “pengorbanan besar” itu. Karena itulah, Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara—ketika itu—menamakan Pancasila merupakan “hadiah terbesar” dari umat Islam kepada Republik Indonesia.”⁶⁹⁸

Lebih jauh, Mohammad Roem berkata, “Hal ini telah beberapa kali diucapkannya. Terakhir, diucapkannya pada *Diet Natalis* Institut Ilmu Al-Qur’an pada tanggal 25 April 1981. Menteri Agama menunjukkan telunjuknya kepada Bapak Kasman Singodimedjo yang hadir pada upacara itu. Bapak Kasman adalah salah seorang wakil umat Islam yang ikut serta dalam “pemberian hadiah” itu. Bapak Kasman juga menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau

⁶⁹⁶*Ibid*, h. 108-109.

⁶⁹⁷Mohammad Hatta, *Pembentukan*, h. 3.

⁶⁹⁸Mohammad Roem, *Tentang*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadir pada rapat 18 Agustus 1945, dan beliau juga menjadi salah seorang tokoh yang ikut *lobbying* saat diadakan rapat oleh Bung Hatta untuk menghilangkan *tujuh kata* dari Piagam Jakarta yang sempat meresahkan para pemimpin non Islam tersebut.”⁶⁹⁹

Itulah untuk pertama kalinya peristiwa bersejarah itu dilihat dengan cara pandang demikian, tutur Mohammad Roem, atas apa yang disampaikan oleh Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Pandangan Menteri Agama, demikian Mohammad Roem, menunjukkan tentang jiwa besar dan mengandung penghargaan besar pula bagi umat Islam.⁷⁰⁰

“Bagaimana peristiwa itu dapat berlangsung?” tanya Roem lebih jauh, kemudian dijawabnya sendiri, “Marilah kita sejenak mengembalikan kenangan kita kepada kejadian-kejadian pada saat itu. Atau, marilah kita ulangi lagi melihat sejarah pada saat itu.”⁷⁰¹ Setelah mengutip catatan peristiwa itu dari Bung Hatta, Mohammad Roem sampai pada kesimpulan,

Dapat dimengerti, bahwa dalam keadaan demikian tidak ada waktu untuk menanyakan, apakah benar opsir Jepang itu wakil dari Kaigun? Dari mana Kaigun mengambil wewenang untuk menjadi penyambung lidah golongan Protestan dan Katolik? Apakah ada resolusi yang diambil oleh golongan Protestan dan Katolik bahwa mereka lebih baik berada di luar Republik kalau “tujuh perkataan” Piagam Jakarta itu ada dalam Preamble Undang-undang Dasar 1945?

Bukankah dalam Panitia Sembilan yang merumuskan dan menanda-tangani Piagam Jakarta pada tangga 22 Juni 1945 itu antara lain duduk Mr. A.A. Maramis yang dapat dipandang mewakili golongan Kristen? Bukankah dalam sidang pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menerima secara bulat Piagam Jakarta pada tanggal 11 dan 16 Juli 1945 itu, terdapat pula orang-orang Kristen lainnya, antara lain Mr. Latuharhari, seorang pemimpin Kristen terkemuka pula?

Semua pertanyaan tersebut pada saat itu (17 Agustus 1945) tidak dapat dipertimbangkan dengan tenang. ... Pendek kata, apa yang dibawa oleh opsir Jepang itu meyakinkan Bung Hatta, sedangkan kita dapat membayangkan bagaimana kedudukan Bung Hatta sebagai pemimpin di kalangan kita pada waktu itu dan seterusnya. Bung Hatta adalah seorang pemimpin yang sampai akhir hayatnya menduduki tempat yang tinggi di hati rakyat itu.”⁷⁰²

⁶⁹⁹ Ibid.

⁷⁰⁰ Ibid.

⁷⁰¹ Ibid.

⁷⁰² Ibid, h. 11-12.

⁷⁰⁶ Mohammad Roem, *Tentang*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kenyataan historis inilah, Prawoto Mangkusasmito, seorang tokoh penting Partai Masyumi, dalam bukunya, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara*, membuat catatan penting berikut ini: Waktu Penulis beberapa waktu kemudian berkesempatan untuk menanyakan kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu, maka jawab beliau singkat sekali, yaitu: “Tauhid.” Dan waktu jawaban Ki Bagus Hadikusumo itu, belum selang beberapa hari lama ini, penulis kemukakan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan, beliau tidak membantahnya.”⁷⁰⁷

Seluruh umat Islam, pasti tahu apa kedudukan, posisi, dan arti penting *kalimat Tauhid* dalam perspektif Islam. Pendekatan *hermeneutik* dari Ki Bagus Hadikusumo atas susunan kalimat, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dengan memaknainya sebagai pemberian komitmen moral tertinggi dari seluruh elemen bangsa ini kepada sikap *Tauhid*, adalah sentral dan tepat. Tidak ada yang lebih tepat dari tafsir Ki Bagus Hadikusumo ini.⁷⁰⁸

Merujuk pada pandangan demikianlah, C.A.O. Van Nieu Wenhuije, dalam bukunya, *The Legacy of Islam*, khususnya membahas salah satu sub judulnya tentang “Indonesia,” pengamat ini dengan tepat pula memberikan tafsirnya atas sila pertama dari Pancasila itu.

Indonesia has five-point state philosophy that dates back to the days shortly before the Japanese surrender. One of the five points is the assertion of what call Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Untranslatable for its compactness, this sentence asserts that He Who is The Absolute One is the Lord. It distinctly evokes the Islamic creed. Except the wording deviates on purpose, so that the adherents of other religions may equality well agree with the assertion.

⁷⁰⁷ Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara*, dalam. Mohammad Roem, *Tentang*, h. 13.

⁷⁰⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Indonesia memiliki falsafah Negara, terdiri dari lima sila, yang berasal dari hari-hari sesaat sebelum Jepang menyerah. Satu dari sila itu adalah pernyataan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak dapat diterjemahkan karena kekompakannya. Kalimat ini menyatakan bahwa Dia satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan. Ia menonjolkan 'aqidah Islam. Akan tetapi, perkataannya dengan sengaja menyimpang, agar pengikut agama-agama lain dapat juga menyetujui pernyataan tersebut).⁷⁰⁹

Pengertian dan kesadaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, siapa pun tahu, ada pada Islam. Pada agama lain di Indonesia, prinsip seperti itu tidak ditemukan.⁷¹⁰

Diktum itu tertera dengan jelas pada ayat pertama surat *al-Ikhlash*, “Katakanlah Allah itu Esa.”⁷¹¹ Karena itu, tafsir Ki Bagus Hadikusumo itu dengan tegas menyebut kalimat *Tauhid*, meski kalimat itu berbunyi, “Tidak ada Tuhan kecuali Allah.” Namun, makna yang terkandung dalam kalimat *Tauhid* tersebut, pada hakikatnya, sama dengan penegasan al-Qur’an dalam surat *al-Ikhlash* itu. Artinya, sebuah penegasan tentang Allah itu Esa, bukan Dua atau Tiga. Sungguhpun kalimat ini, oleh Van Nieu Wenhuije, disebutnya sebagai “perkataan yang dengan sengaja menyimpang, agar pengikut agama-agama lain dapat juga menyetujui pernyataan tersebut.”⁷¹²

Akan tetapi, karena Van Nieu Wenhuije bukan orang Islam, tentu pengertiannya tentang istilah itu bisa dimengerti. Adapun yang dimaksudkan dengan kata “menyimpang” di situ bisa dilihat dari pernyataan kalimat *Tauhid* dalam ungkapan eksplisitnya, “Tidak ada Tuhan kecuali Allah.” Di sini, secara harfiah, Van Nieu Wenhuije benar dalam keterangannya.⁷¹³ Harus ditegaskan pula bahwa ungkapan implisit kalimat *Tauhid* itu bisa dalam bentuk kalimat yang berbeda

⁷⁰⁹C.A.O. Van Nieu Wenhuije, *The Legacy of Islam*, dalam, Mohammad Roem, “Tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945,” h. 13

⁷¹⁰Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), Cet. ke-3, h. 78.

⁷¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, Juz: XXX, h. 922.

⁷¹²B.J. Boland, *Nation Character Building*, h. 72-73.

⁷¹³*Ibid.*

meskipun maknanya *muradif* (setara) dengan itu, seperti salah satu maknanya ditafsirkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, dengan merujuk pada ayat pertama surat al-*Ikhlas* tersebut. Kita semua tentu tahu, siapa sesungguhnya Ki Bagus Hadikusumo itu. Beliau adalah tokoh penting Muhammadiyah, sehingga wajar saja kalau cara pemaknaan beliau atas istilah itu, tidak bisa lain kecuali dengan prinsip “Tauhid.”⁷¹⁴ Dan, inti *Tauhid* itu adalah meng-Esa-kan Allah.⁷¹⁵ Persis seperti bunyi diktum pada sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* tersebut. Karena itu, sungguh benarlah beliau!

Lantas, bagaimana dengan posisi hukum Piagam Jakarta dalam tata hukum nasional setelah adanya *amandemen* dari Ki Bagus Hadikusumo itu? Bahwa sebelum adanya amandemen terhadap tujuh kata, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya*,” sejak ditandatangani *gentlemen agreement* pada 22 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945, posisi hukum Piagam Jakarta adalah sangat kuat, yakni sebagai *Authoritative Source* (Sumber Hukum Autoritatif) dalam tata hukum nasional. Namun, setelah amandemen pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 5 Juli 1959, posisi hukum Piagam Jakarta dalam tata hukum nasional, berubah hanya menjadi *Persuative Source* (Sumber Hukum Persuasif).⁷¹⁶

C. Sumber Autoritatif

“Dekrit Presiden 5 Juli 1959”

Rupanya, hasil pemilihan umum tanggal 15 Desember 1955, diikuti dengan pelantikan anggota Konstituante oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, tidak menggembirakan bagi umat Islam. Sebab, merujuk pada hasil pemilihan

⁷¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam*, h. 79.

⁷¹⁵*Ibid*, h. 80.

⁷¹⁶Juhaya S. Praja, “Pengantar,” dalam, Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung Rosdakarya, 1991), Cet ke-1, h. xi

Dengan demikian, perimbangan kekuatan di antara dua golongan yang sedang bersaing ini, boleh dikatakan hampir berimbang, sekitar empat berbanding lima. Atas dasar hasil pemiluhan umum ini, nyatalah sudah bahwa pihak Islam sama sekali tidak terwakili secara layak—sebagaimana harapan tokoh-tokoh Islam, sekaligus memenuhi ajuran Soekarno dan Muhammad Hatta—jauh sebelum pemilihan umum berlangsung. Saat itu, kedua “Bapak Proklamator” ini mengingatkan bahwa jika umat Islam hendak memperjuangkan syariat Islam berlaku di Indonesia, mereka harus bekerja keras untuk meraih suara mayoritas melalui wakil-wakil mereka yang ada di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Hanya melalui suara mayoritas di Parlemen itulah, diharapkan mereka mampu mendorong pemberlakuan syariat Islam di Indonesia melalui wadah yang tepat.⁷¹⁹

⁷¹⁷Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), Cet. ke-1, h. 129.

719 Ahm

⁷¹⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 41-44.

tokoh Islam, seperti harapan Bung Karno dan Bung Hatta di atas, otomatis undang-undang tersebut berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, setelah melihat hasil pemilu 1955 itu, nampaknya anjuran Bung Karno dan Bung Hatta itu menjadi *anti klimaks*, berada di luar dugaan, tidak seperti prediksi dan harapan tokoh-tokoh Islam jauh sebelum pemilu berlangsung.⁷²⁰

Dalam Sidang-sidang Konstituante, muncul di tengah-tengah perdebatan sengit itu, tiga usul inisiatif berkaitan dengan *philosophische grondslag* (Filsafat Dasar Negara): *Pancasila*, *Islam*, dan *Sosial Ekonomi*. Usul pertama, *Dasar Pancasila*, didukung oleh PNI (116 suara), PKI (80 suara), Parkindo (16 suara), Partai Katolik (10 suara), PSI (10 suara), IPKI (delapan suara), dan partai kecil lainnya, dengan jumlah total 273 wakil. Usul kedua, *Dasar Islam*, didukung oleh Masjumi (112 suara), Nahdlatul Ulama (91 suara), PSII (16 suara), Perti (tujuh suara), dan empat partai kecil lainnya, dengan jumlah total suara 230 dalam Konstituante. Usul ketiga, *Dasar Sosial Ekonomi*, hanya didukung oleh sembilan suara: lima suara di antaranya Partai Buruh, sedangkan empat suara lainnya didapatkan dari Partai Murba.⁷²¹

“Pemilihan umum 1955 tidak membawa kemenangan pada satu aliran pun dalam masyarakat Indonesia,” tulis B.J. Bolang. “Perimbangan kekuatan yang terjadi mengharuskan kompromi politik, baik di Parlemen maupun di Majelis Konstituante,” tegasnya.⁷²²

⁷²⁰ Endang Saifuddin Anshari, “Piagam Jakarta,” dalam Rachmat Taufiq Hidayat, dkk, *Almanak Alam Islami: Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, (Jakarta: Pustaka Jaya Raya, 2000); Bandingkan dengan Sabar Sitanggang, (peny.), *Mengapa*, h. 87.

⁷²¹ Anonim, *Laporan Komisi Konstitusi tentang Dasar Negara*, dalam J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Raeng Say, *Konstitusi dan Konstituante Indonesia*, (Jakarta: t.n.p., t.th.), h. 169-173; Lihat juga, Endang Saifuddin Anshari, "Piagam Jakarta," h. 87

⁷²²B.J. Boland, *The Truggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Haque, 1971), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Konstituante sendiri, berkecenderungan kuat untuk mencari “titik temu.” Wilopo misalnya, dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum Majelis Konstituante, juga seorang tokoh utama PNI, mendorong dengan sungguh-sungguh tentang perlunya menempuh jalan kompromi tersebut. “Usaha pengolahan berjenis-jenis paham itu tidak mungkin menghasilkan lain daripada suatu kompromi. Suatu *resultante* daripada *paralelogram* gaya aliran-aliran yang ada dalam masyarakat,” katanya.⁷²³

“Islam atau Pancasila juga sama-sama ingin supaya bangsa kita ini bahagia,” kata Soewirjo, ketua umum PNI, ketika tokoh ini berbicara dalam Sidang Konstituante tanggal 21 November 1957. Pada saat yang sama, Wongsonegoro, ketua umum PIR mengusulkan dibentuknya sebuah panitia *ad hoc* sebagai sebuah panitia kompromi yang terdiri atas 10 orang anggota: pihak Islam dan pihak Pancasila masing-masing diwakili oleh lima orang anggota. Profesor Sutan Takdir Alisjahbana, juru bicara PSI mengemukakan: Dalam Sidang Pleno sekarang, barangkali dapatlah kita mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk menyusun suatu kompromi, di mana kedua belah pihak yang bertentangan memberikan pengorbanannya masing-masing.⁷²⁴

Dengan jiwa dan semangat yang sama, Firmansjah, tokoh IPKI, menyerukan kepada segenap anggota Konstituante untuk menyatu padukan pendapat dalam satu pendapat yang bulat, pendapat yang menjamin adanya unsur pokok pandangan yang hidup dalam Majelis, sehingga tiap-tiap pihak tidaklah merasa dirugikan dan

⁷²³Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 88.

⁷²⁴Anonim, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*, (Jakarta: t.p., t.t.), h. 40-41.

dikecewakan. Dengan demikian, masing-masing pihak, tidak ada yang merasa menang ataupun kalah.⁷²⁵

Menurut Endang Syaifuddin Anshari, melalui sidangnya yang ketiga, yakni pada Rapat Pleno ke-59, tertanggal 11 November 1957—setahun setelah Majelis Konstituante itu dilantik—Majelis Konstituante telah membentuk Panitia Perumus Dasar Negara, terdiri atas 18 orang yang mewakili semua kelompok dalam Majelis. Dalam Rapat Pleno Majelis Konstituante pada tanggal 6 Desember 1957, Panitia Perumus telah berhasil melaporkan “lima simpulan penting.” Lima simpulan penting inilah yang mencerminkan kemauan baik kedua belah pihak, berikut usaha-usaha yang sungguh-sungguh yang telah mereka lakukan untuk menghasilkan suatu rumusan moderat yang mampu menampung segala keinginan kedua belah pihak.⁷²⁶ Sayangnya, kita tidak mendapatkan penjelasan yang lebih memadai tentang hal-hal apa sajakah yang termaktub dalam apa yang disebut Endang Syaifuddin Anshari sebagai “lima simpulan penting” tersebut.

“Tidaklah beralasan,” tegas Endang Syaifuddin Anshari, “kesimpulan sementara orang yang mengatakan bahwa Majelis Konstituante“ tidak menghasilkan apa pun yang bermakna, seperti dikatakan Harun Nasution,” atau “tanpa hasil kongkret sedikit pun, seperti diteorikan oleh Ruslan Abdul Gani.”⁷²⁷ Atau, kesimpulan lainnya yang sejiwa dan semakna dengan itu, sebagaimana sering dilansir oleh sementara orang. Majelis ini, kata Anshari lebih jauh, sambil mengutip kata-kata

⁷²⁵ *Ibid*, h. 39.

⁷²⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 89.

⁷²⁷ *Ibid*.



Wilopo, ketua umum Majelis Konstituante, sudah dapat menyelesaikan 90% tugasnya.⁷²⁸

Di sinilah, kemudian para pakar politik segera mengajukan teori, “Seandainya saja Majelis ini diberikan kesempatan yang lebih *fair* dalam masa kerjanya hanya beberapa bulan saja, tanpa intervensi dari luar, niscaya Majelis ini dapat melaksanakan 100% tugasnya.”⁷²⁹ Akan tetapi, siapakah yang dapat menjamin kebenaran hipotetis semacam ini? Tentu saja bahwa siapa pun boleh berteori atau membangun hipotetis sesuai dengan kebutuhan politiknya, meskipun kenyataan lapangan berbicara lain.⁷³⁰

Teori ini berasumsi bahwa jika Bung Karno sedikit bersabar saja, dan jika saja tidak ada intervensi politik dari luar ke dalam Majelis Konstituante, niscaya Majelis ini dapat berhasil menyelesaikan problem-problemnya dengan tuntas, sambil merampungkan tugas mulia yang dipercayakan oleh segenap rakyat Indonesia pada pundak mereka untuk membentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang permanen, sekaligus diterima secara bulat dan setulus hati, serta didukung dan dijunjung tinggi oleh segenap kelompok yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁷³¹

Sungguhpun demikian, penulis dapat mengajukan pertanyaan, kalau saja Majelis Konstituante yang terhormat itu mampu diintervensi oleh pihak eksekutif, lantas apa lagi yang lebih “rapuh” selain dari ini? Secara teoretik, sebuah “intervensi politik” dapat dengan efektif berjalan manakala posisi lembaga yang hendak diintervensi pun memang sedang dalam “kerapuhan yang parah.” Sebuah hipotetik

⁷²⁸ *Ibid.*

⁷²⁹ *Ibid.*

⁷³⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 42-43.

⁷³¹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 89: lihat juga, Achmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 181.

sebaliknya dapat diajukan, seandainya saja bahwa Majelis Konstituante tampil sebagai lembaga yang kuat dan mampu mengemban amanah secara taat asas, apakah mungkin sebuah intervensi politik dapat berjalan efektif? Jawaban penulis agaknya *negasi*. Meskipun, dalam salah satu tulisannya, Goerge Mc Turnan Kahin, menguatkan simpulan di atas ketika tahun 1978, dia menulis,

*Mengenai peranan Natsir dalam pekerjaan Konstituante, tampaknya bagi saya, ia telah menyelesaikan lebih daripada apa yang pada umumnya telah diakui. Di tengah-tengah adanya satu kecurigaan keras pada partai-partai non-Islam, maka Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Osman Raliby, dan pemimpin-pemimpin progresif Masjumi lainnya pada akhirnya telah bergerak jauh dalam menyesuaikan kedudukan partai mereka dengan Konstituante. Menjelang akhir, kelihatannya seolah-olah telah cukup ditemukan tempat berpijak bersama yang cukup baik bagi kompromi-kompromi terakhir yang seyogyanya dapat menghasilkan satu undang-undang dasar yang cocok dengan keadilan sosial dan politik Indonesia. Kalaulah Soekarno tidak mengakhiri kehidupan Konstituante itu dengan begitu kasar, saya percaya bahwa sesungguhnya ada satu kesempatan baik dan wajar untuk mencapai persetujuan yang diperlukan itu di antara dua per tiga dari para anggotanya.*⁷³²

Namun, sungguh mengejutkan, hanya berselang satu hari setelah Rapat Pleno terakhir Panitia Persiapan Konstitusi itu berlangsung, tiba-tiba saja Kabinet Djuanda memutuskan secara bulat untuk melaksanakan prinsip “Demokrasi Terpimpin” dalam rangka “Kembali ke Undang-undang Dasar 1945.” Ini merupakan suatu *intervensi* politik amat kasar dari eksekutif yang dilakukan meminjam istilah Mahkamah Konstitusi—secara sistematis, terstruktur, dan massif *dari luar ke* dalam Majelis Konstituante.⁷³³ Faktanya, setelah adanya putusan Kabinet tersebut, posisi Konstituante pun menjadi goyah dan akhirnya terkapar setelah hadirnya Dekrit Presiden.⁷³⁴

“Anjuran Presiden/Pemerintah itu *lahirnya* merupakan ‘anjuran untuk Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka Kembali ke Undang-undang Dasar

⁷³² Goerge Mc Turnan Kahin, *Mohammad Natsir*, dalam *Panitia Buku Peringatan Mohammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Panitia Peringatan Mohammad Natsir, 1978), h. 328

⁷³³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 91.

⁷³⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam*, h. 45-50.

1945,’ sedangkan *batinnya* merupakan ‘anjuran untuk Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin’.”⁷³⁵ Simpulan ini, ternyata dibenarkan pula oleh praktik-praktik politik dan ketatanegaraan Indonesia melalui corak dan gaya kepemimpinan Presiden Soekarno pribadi. Presiden RI pertama ini kemudian berusaha dengan berbagai cara untuk memusatkan segala kekuasaan Negara ke dalam genggamannya sendiri.⁷³⁶

Sehubungan dengan “anjuran” pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu, sekali lagi, para anggota Majelis Konstituante terbagi ke dalam dua blok besar dalam menanggapi “anjuran” Pemerintah tersebut. Fraksi-fraksi bukan Islam, tentu saja, menerima dan mendukung “anjuran” pemerintah tersebut tanpa *reserve* (tanpa syarat) untuk “Kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan apa pun.” Pada pihak lain, fraksi-fraksi Islam, saat menerima dan mendukung “anjuran” Pemerintah untuk “Kembali ke UUD 1945 tetapi dengan perubahan tertentu.” Oleh karena itu, baik juga untuk dicatat di sini bahwa adanya perbedaan “empat versi pernyataan pemerintah” tentang Piagam Jakarta dalam kaitannya dengan *anjuran* untuk “Kembali ke Undang-undang Dasar 1945.”⁷³⁷

Versi *pertama*, dirumuskan pada tanggal 19 Februari 1959, hanya sekedar, “Diakui adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar

⁷³⁵ B.J. Boland, *The Struggle of Islam*, h. 19; Bandingkan juga dengan, Endang Saifuddin Anshari, “Piagam Jakarta,” h. 90

⁷³⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 91.

⁷³⁷ *Ibid.*



Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Mohammad Yamin.”⁷³⁸

Versi *kedua*, penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Djuanda di depan Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 2 Maret 1959, menegaskan bahwa, “Pemerintah mengakui pula adanya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, adalah dokumen yang mendahului pembentukan Undang-undang Dasar 1945.”⁷³⁹

Versi *ketiga*, melalui “anjuran” Presiden Soekarno di depan Sidang Majelis Konstituante pada tanggal 22 April 1959, di mana Presiden Pertama Republik Indonesia ini dengan gagah menegaskan bahwa, “Piagam Jakarta adalah ‘dokumen historis’ yang memelopori dan memengaruhi pembentukan Undang-undang Dasar 1945.”⁷⁴⁰

Versi *keempat*, melalui jawaban pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Djuanda di depan Majelis Konstituante pada tanggal 21 Mei 1959, “Pemerintah mengakui Piagam Jakarta ... sebagai dokumen historis yang menjiwai penyusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi bagian daripada Konstitusi Proklamasi.”⁷⁴¹

Namun, keterangan yang diberikan, baik oleh Perdana Menteri Djuanda maupun oleh Presiden Soekarno itu, ternyata masih tidak memuaskan bagi kalangan fraksi-fraksi Islam di Majelis Konstituante. Maka, pada tanggal 26 Mei 1959, melalui inisiatif K.H. Masjkur, tokoh terkemuka NU, bertindak atas nama semua

⁷³⁸ *Ibid.*

⁷³⁹ *Ibid.*

⁷⁴⁰ *Ibid.*, h. 92.

⁷⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fraksi Islam di Konstituante, mengajukan usul inisiatif tentang dua hal pokok, yakni: “(i) agar Piagam Jakarta dijadikan sebagai *Muqaddimah* Undang-undang Dasar 1945, dan (ii) Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 hendaknya berbunyi, ‘Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.”⁷⁴²

Namun, usul K.H. Masjkur ini, setelah melalui pemungutan suara, dari 466 anggota yang hadir—jumlah seluruhnya 470 orang—201 suara mendukung usul K.H. Masjkur dan 265 suara menolaknya.⁷⁴³ Setelah pemungutan suara tentang usul, “Kembali ke UUD 1945 dengan perubahan tertentu,” tibalah saatnya giliran diadakan pemungutan suara tentang usul, “Kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan.” Pemungutan suara untuk usulan kedua ini berlangsung sebanyak tiga kali. Pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, dengan hasil-hasil sebagai berikut: 269 setuju dan 199 menolak; 264 setuju dan 204 menolak; 263 setuju dan 204 menolak.⁷⁴⁴

Dengan demikian, baik usul fraksi-fraksi Islam, yakni “Kembali ke UUD 1945 dengan perubahan tertentu,” maupun usul fraksi-fraksi lainnya, yakni “Kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan,” kedua-duanya telah tidak dapat diterima oleh Majelis Konstituante. Karena kedua-duanya tidak pula memenuhi syarat 2/3 dari jumlah suara anggota Majelis Konstituante yang hadir dalam sidang tersebut.⁷⁴⁵

Prawoto Mangkusasmito saat mengomentari jawaban Pemerintah atas pertanyaan K.H. Achamd Sjaichu, tentang “hasil akhir” Majelis Konstituante pada tanggal 23 Mei 1959, menegaskan bahwa,

⁷⁴²*Ibid.*

⁷⁴³Mohammad Yamin, *Naskah III*, h. 569.

⁷⁴⁴*Ibid.*, h. 618.

⁷⁴⁵Endang Saifuddin Anshari, *Piagam*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Karena approach yang kurang tepat dari Pemerintah, antara lain dengan keterangan yang mengandung unsur-unsur intimidasi dan karena konsepsi Pemerintah ini kemudian ternyata tidak dapat dipertahankan dalam bentuknya yang semula, maka akhirnya maksud Pemerintah tidak dapat diterima oleh Konstituante.*⁷⁴⁶

Memperhatikan perkembangan di Majelis Konstituante yang tidak ada harapan untuk menemukan “jalan tengah,” bahkan cenderung berjalan ke arah *deadlock* (jalan buntu), Hamara Efendi, tokoh IPKI, dan Anwar Sanusi, tokoh PKI, menganjurkan agar Konstituante membubarkan diri. Akhirnya, sidang Pleno Majelis Konstituante pada tanggal 2 Juni 1959 itu, ternyata menjadi sidang terakhir bagi Majelis Konstituante.⁷⁴⁷ Kemacetan inilah menjadi argumen paling logis bagi lahirnya apa yang dicatat dalam sejarah sebagai “Dekrit Presiden 5 Juli 1959.”⁷⁴⁸

Majelis Konstituante benar-benar menemui “jalan buntu” (*deadlock*) pada bulan Juni 1959, disebabkan oleh mayoritas para anggotanya—terutama mereka dari fraksi-fraksi non Islam—menolak menghadiri sidang-sidang di Bandung. Menghadapi krisis Konstitusional seperti ini, Presiden Soekarno turun tangan dengan merumuskan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959.⁷⁴⁹ Sehubungan dengan persoalan ini, Prawoto Mangkusasmito, menyampaikan catatan sebagai berikut:

*Pokok persoalannya tetap sama, yaitu [sebuah upaya] mendapatkan satu rumusan yang secara lahir-batin sepenuhnya dapat bersama-sama didukung oleh kedua golongan besar di dalam masyarakat Indonesia, sebagai suatu perpaduan. ... Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa dekrit kemudian tiada akan mendapatkan perlawanan yang kuat, di-usahakan adanya perumusan yang lebih mendekatkan pendirian kedua golongan di Konstituante daripada yang sudah dirumuskan dalam rancangan Piagam Bandung.*⁷⁵⁰

Dekrit Presiden dalam versinya yang lebih “moderat” sekaligus mengakomodir dengan baik dan sungguh-sungguh suara dari kalangan Islam itu, dirumuskan di

⁷⁴⁶ *Ibid.*, 92-93.

⁷⁴⁷ *Ibid.*, h. 93.

⁷⁴⁸ *Ibid.*

⁷⁴⁹ *Ibid.*

⁷⁵⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959, kemudian diumumkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, tepat pukul 17.00 WIB di depan Istana Merdeka, Jakarta.⁷⁵¹ Dokumen penting dan bersejarah itu, selengkapnya berbunyi:

DEKRIT PRESIDEN⁷⁵²

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGlima TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG:
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Kami Presiden Republik Indonesia/Penglima Tertinggi Angkatan Perang,
Atas nama rakyat Indonesia,

Dengan ini mengatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, maka Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan kita yang kacau dan membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil-makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, maka kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar hal-hal tersebut di atas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
Memutuskan:

Menetapkan: (i) pembubaran konstituante; (ii) berlakunya kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlaku lagi Undang-undang Dasar Sementara; dan (iii) pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daera-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas namarakyat Indonesia:

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

⁷⁵¹ Ibid.

⁷⁵² Rachmat Taufiq Hidayat, dkk, *Almanak Alam Islami: Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*, (Jakarta: Pustaka Jaya Raya, 2000); Bandingkan dengan Sabar Sitanggang, (peny.), *Mengapa*, h. 94 dan 98; Lihat juga, Rika T, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap)*, *Naskah Proklamasi, Pancasila, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, Sumpah Pemuda, Supersemar, MPRRI, DPRRI*, (Jakarta: Triana Media, 2014), h. 113.

t.t.d.
SOEKARNO.⁷⁵³

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 inilah, posisi hukum Piagam Jakarta, berubah secara fundamental. Mengapa demikian? Karena dalam salah satu konsideran dari Dekrit Presiden ini berbunyi, “*Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.*” Para pakar hukum tata negara, meski ada perbedaan,⁷⁵⁴ umumnya berpendapat bahwa dengan penegasan secara *eksplisit* dalam dekrit ini maka dekrit tersebut jelas-jelas meletakkan kembali posisi hukum “Piagam Jakarta” sebagai *Authoritative Source* (Sumber Hukum Berkekuatan Hukum Tetap), dalam tata hukum nasional Indonesia.⁷⁵⁵

Dengan demikian, jelas sekali bahwa pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, baik perdata maupun pidana, dinyatakan berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Dekrit Presiden tersebut. Sebab, Piagam Jakarta, menempati suatu posisi terhormat, luhur, dan tertinggi, dalam tata hukum nasional, karena ia berada pada *Pembukaan* sebagai “pokok dari pokok” sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia.⁷⁵⁶

Persoalannya, bagaimana *caranya* agar pemberlakuan syariat Islam, terutama hukum pidana Islam—setelah hukum perdata Islam berlaku sepenuhnya—di

⁷⁵³ *Ibid.*

⁷⁵⁴ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sidjabat, seorang penganut Katolik yang taat, bahwa rumusan itu untuk semua agama di Indonesia, bukan semata untuk Islam. Namun, Sidjabat lupa bahwa di dalam agamanya tidak ada Tuhan Yang Maha Esa, kecuali *Trinitas* (Tuhan Tiga: Bapak, Ibu, dan Anak). Keterangan soal pendapat Sidjabat ini, lihat misalnya, B.J. Boland. “Nation and Character Building,” h. 73.

⁷⁵⁵ Ismail Sunny, *Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional*, Panjimas, No. 486, Tahun XXVII, 8 Rabiul Awwal 1406/22 November 1985, h. 18-19.

⁷⁵⁶ Mohammad Hatta, *Pembentukan*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia? Maka kata-kata Bung Karno berikut ini bisa dijadikan pegangan. Sewaktu berbicara tentang bagaimana *cara* memberlakukan syariat Islam di Indonesia, Bung Karno, sebagaimana Bung Hatta mengatakan hal yang sama dalam kesempatan lainnya, memberi jalan keluar melalui asas permusyawaratan dalam perwakilan. Soekarno berkata,

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun adalah orang Islam—maaf beribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati. Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam melalui mufakat dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Badan Perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar sebagian terbesar kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. ... Ibarat-nya, Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu adalah hukum Islam pula. Malah saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat kita, sehingga 60%, 70%, 80%, 90%, utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. ...⁷⁵⁷

Setelah Bung Karno dan Bung Hatta menegaskan pendirian mereka tentang Piagam Jakarta, kini giliran KH Saifuddin Zuhri, tokoh NU, sekaligus Menteri Agama terlama di era Orde Lama, menyampaikan argumentasinya. “Piagam Jakarta 22 Juni 1945,” katanya lebih jauh, “jika dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945, hanya berbeda sangat tipis pada *tujuh kata* yang berbunyi, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.”⁷⁵⁸ Oleh karena itu, mantan Menteri Agama ini dengan tegas, kembali mengingatkan bahwa:

⁷⁵⁷B.J. Boland, *The Tsruggle of Islam in Modern Indonesia*, Terjemahan Syaafroedin Bahar, dengan Judul, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafisti Pers, 1985). Bandingkan juga dengan, B.J. Boland, *The Nation and Character Building*, dalam Sabar Sitanggang, (peny.), *Mengapa Tujuh Kata?* (Jakarta: Bina Mitra Wisesa, 2004), h. 51. Nampaknya, B.J. Boland mengutip pendapat ini untuk menegaskan satu hal bahwa, “pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, meskipun sudah ada “kata putus” dari konstitusi, tetapi masih ada instrument lain di luar itu untuk memerjuangkannya, yaitu Parlemen.

⁷⁵⁸ Saifuddin Zuhri, *Menghilangkan*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya nilai dari tujuh kata itu bersifat konstitusional dan tidak seolah-olah menganakemaskan ummat Islam. Ummat Islam adalah golongan mayoritas. Mereka telah dijamin hak-haknya dalam melaksanakan tujuh kata tersebut di atas itu oleh pasal 29 UUD 1945. Tanpa tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, hak-hak ummat Islam melaksanakan kewajiban syar'iat Islam mereka tetap dijamin oleh UUD 1945 (pasal 29 ayat 1 dan ayat 2).⁷⁵⁹

Tidak sedikit orang yang melupakan bahwa justru Piagam Jakartalah yang dengan tegas-tegas menyebutkan kelima sila dalam Pancasila, mendahului pengesahan UUD 1945 itu sendiri. Sebagaimana kita keta-hui, Piagam Jakarta ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, sedangkan UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu boleh dibilang tidak “diributkan” oleh ummat Islam, demi memelihara persatuan dan demi ketahanan perjuangan dalam revolusi Bangsa Indonesia, althans untuk menjaga kekompakan seluruh potensi nasional mempertahankan momentum Proklamasi 17 Agustus 1945 yang baru berusia satu hari itu. Apakah ini bukan toleransi terbesar dari ummat Islam Indonesia? Jika pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu tatkala UUD 1945 disahkan, ummat Islam “ngotot” mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, barangkali sejarah akan menjadi lain. Tetapi sejarah telah terjadi. Ummat Islam hanya mengharapkan prospek-prospek di masa depan semoga segalanya akan menjadi hikmah.

Sebab itu, tidaklah beralasan jika masih ada prasangka terhadap ummat Islam hanya dikarenakan oleh Piagam Jakarta, justru sejarah telah membuktikan bahwa betapa besar toleransi ummat Islam terhadap Negara dan Bangsa. Ummat Islam hanya mengharapkan semoga memperoleh respons toleransi dari pihak lain, jikalau ummat Islam menggunakan hak-hak mereka melalui pasal 29 UUD 1945 di dalam “melaksanakan syari'at Islam secara komplit dan legal.”⁷⁶⁰

Penulis mencatat penegasan tokoh NU ini pada kalimat, “melaksanakan syari'at

Islam secara *komplit* dan *legal*.” Komplit dan legal itu berarti, pelaksanaan syariat Islam “secara penuh” di bumi Indonesia, karena telah berkekuatan hukum tetap (*legal authoritative*). Malahan, penegakan syariat Islam secara *penuh* dan *utuh* tersebut, baik dalam bidang hukum perdata Islam maupun hukum pidana Islam, adalah perintah Konstitusi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maupun perintah Pasal 29 UUD 1945. Hukum perdata Islam, telah cukup lama diberlakukan sebagai “hukum positif” di Indonesia. Sedangkan salah satu bidang yang masih amat telantar adalah “hukum

⁷⁵⁹Penegasan eksplisit, Pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2 berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 2).”

⁷⁶⁰Saifuddin Zuhri, *Menghilangkan*, h. 22-23.

pidana Islam (*fiqh jinayah*).”⁷⁶¹ Di sinilah menjadi tanggung jawab para cendekiawan Muslim untuk merumuskan “hukum pidana Islam” secara modern, relevan dengan kebutuhan ruang dan waktu Indonesia modern.⁷⁶²

Sehubungan dengan masalah ini, Ismail Sunny, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, pada tahun 1985 menegaskan:

Walaupun pembaruan hukum nasional tidak dicantumkan dalam UUD 1945 dengan tegas, tetapi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyebut 16 hal yang harus diatur dengan undang-undang organik, dapat disimpulkan bahwa untuk hal-hal itu diperlukan hukum nasional. Dengan menyatakan dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” Secara eksplisit, [pernyataan ini] menunjuk kepada perintah untuk melakukan pembaruan hukum nasional. Terutama pasal-pasal I.S. tidak bisa berlaku lagi, karena ia merupakan semacam UUD bagi Hindia Belanda, sehingga dengan berlakunya UUD 1945 menjadi tidak berlaku lagi.

Jadi, tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa “warisan pemerintah kolonial” perlu kita transfer. Kesalahan sekarang ini terletak pada [kemampuan] kita yang belum siap membuat undang-undang yang berlaku untuk ummat Islam.

Setelah kemerdekaan kita dan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut,” tidak banyak yang telah kita lakukan. ...

Peranan yang lebih positif diharapkan dari ahli-ahli hukum Islam untuk membuat draft hukum yang dibutuhkan umat Islam secara modern, seperti “Hukum Waris dan hukum-hukum lainnya,” yang sesuai dengan jiwa dan prinsip hukum Islam di satu pihak, dan dalam rangka menunjang pembangunan dan modernisasi di pihak lainnya.”⁷⁶³

Ada lima point penting yang disampaikan Ismail Sunny melalui tulisannya di atas yang perlu kita catat. *Pertama*, diperlukan hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia modern melalui undang-undang organik. *Kedua*, adanya perintah konstitusi untuk melakukan pembaruan hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia modern itu. *Ketiga*, adanya *kelalaian* para ahli hukum Islam terhadap tanggung jawab mereka untuk membuat undang-undang yang berlaku untuk

⁷⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 116-117; Bandingkan juga dengan misalnya, Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional,” dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum*, h. 150-153.

⁷⁶² M. Syafii Anwar, *Politik*, h. 16-17.

⁷⁶³ Ismail Sunny, “Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional,” dalam *Panjimas*, No. 486 Tahun XXVII, 8 Rabiul Awwal 1406 H/21 November 1985, h. 18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam. *Keempat*, setelah kemerdekaan dan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan, “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut,” ternyata juga tidak banyak yang telah dilakukan oleh para intelektual Islam untuk menjawab perintah konstitusi tersebut. *Kelima*, sejatinya diperlukan draft undang-undang organik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia modern demi menunjang pembangunan hukum nasional.⁷⁶⁴

Benar bahwa bangsa ini sudah memiliki berbagai undang-undang yang mencerminkan Islam mulai memegang peranan penting dalam negara, seperti Undang-undang Peradilan Agama,⁷⁶⁵ sebagai *pengganti* atas Undang-undang Perkawinan,⁷⁶⁶ Undang-undang Peradilan Agama,⁷⁶⁷ Undang-undang Wakaf,⁷⁶⁸ Undang-undang Zakat,⁷⁶⁹ Undang-undang Haji,⁷⁷⁰ Undang-undang Perbankan Syariah,⁷⁷¹ maupun Undang-undang Bea Meterai.⁷⁷² Jika semua undang-undang ini kita anggap sebagai Undang-undang Hukum Perdata Islam, yang telah berhasil dijadikan sebagai *hukum positif* yang berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, nyatalah sudah bahwa kita belum mempunyai Undang-undang tentang Hukum Pidana Islam yang akan dijadikan sebagai *hukum positif* di Indonesia.⁷⁷³

Jika merujuk pada perintah konstitusi, khususnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai konstitusi Negara RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan Pasal 29 ayat 1

⁷⁶⁴ Ismail Sunny, *Hukum*, h. 18-19.

⁷⁶⁵ UUPA No. 7 Tahun 1989.

⁷⁶⁶ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁷⁶⁷ UUPA No. 7 Tahun 1989 jo, UUPA No. 3 Tahun 2006.

⁷⁶⁸ UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

⁷⁶⁹ UU Zakat No. 38 Tahun 1999.

⁷⁷⁰ UU Haji No. 17 Tahun 1999.

⁷⁷¹ UU Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998.

⁷⁷² UU Bea Meterai No. 13 Tahun 1985.

⁷⁷³ Ismail Sunny, *Hukum*, h. 19.

dan 2 UUD 1945, dan andai saja para pakar hukum Islam lebih siap, seharusnya dan sewajarnya umat Islam Indonesia telah memiliki tambahan undang-undang tentang hukum pidana Islam yang sesuai dengan jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam di satu pihak, dan dalam rangka menunjang pembangunan dan modernisasi di pihak lainnya, seperti diisyaratkan dengan sungguh-sungguh oleh pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Ismail Sunny, sejak 30 tahun lalu tersebut.⁷⁷⁴

Sekaranglah saatnya, cita-cita yang tertunda selama bertahun-tahun itu, perlulah kiranya diwujudkan oleh generasi muda Indonesia modern. “Hemat saya,” kata Ismail Sunny, “perundang-undangan yang diduga dapat menimbulkan kerawanan, agar dipersiapkan dengan lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa dengan sistem target segala. Cara yang ditempuh oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dalam mengumpulkan bahan GBHN 1988, yang telah memulai masa kerjanya sejak tahun 1985 dengan meminta partisipasi Sumber I yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat/cendikiawan, Sumber II yang terdiri dari tokoh-tokoh universitas, dan Sumber III yang terdiri dari wakil-wakil setiap Departemen. Maka, pada tingkat penyusunan draft undang-undang pun—apalagi undang-undang tentang hukum pidana Islam (pen.)—persiapan yang saksama itu pun sangat diperlukan.”⁷⁷⁵

Inilah sesungguhnya arah yang hendak di tuju oleh kajian ini.

D. Sumber Autoritatif

“Pasal 29 UUD 1945”

Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, masing-masing menegaskan bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1); Negara menjamin kemerdekaan

⁷⁷⁴*Ibid.*

⁷⁷⁵*Ibid.*

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (ayat 2).”⁷⁷⁶ Penegasan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 ini, jelas sekali menjadi salah satu “sumber autoritatif” bagi penerapan syariat Islam di Indonesia. Penegasan ini relevan dengan peringatan KH Saifuddin Zuhri:

*Bahwa tujuh kata dalam hubungannya dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak menjadi hilang meskipun Piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam UUD 1945. Sebab, melaksanakan syari’at Islam bagi umat Islam Indonesia, tetap dijamin oleh pasal 29 UUD 1945. Bahkan, bangsa Indonesia yang beragama Islam dapat melaksanakan Pancasila tanpa melepaskan syari’at Islam. Karena seluruh sila-sila dalam Pancasila, bila diamalkan secara semestinya, tidak mengandung kontradiksi dengan syari’at Islam itu sendiri.*⁷⁷⁷

Hazairin dalam salah satu penjelasannya memandang bahwa perwujudan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada Piagam Jakarta, itu maha penting bagi penjelasan terhadap Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,*” maka tanpa perangkaian tersebut, maknanya akan menjadi kabur dan dapat menimbulkan berbagai macam tafsir yang bersimpang siur dan *absurd*.⁷⁷⁸

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” mengandung makna bahwa apa pun yang dibangun oleh Negara ini, harus bersumber dan berasaskan pada nilai-nilai agama. Pembangunan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan seterusnya, harus merujuk pada “nilai-nilai asasi” (*corevalues*) yang terkandung dalam agama itu. Jatuh dan bangunnya negara ini, bergantung pada di tempat mana kita berpijak. Dan agama adalah pijakan “dasar dari yang dasar,” atau meminjam

⁷⁷⁶ Rika T., *UUD 1945 (Amandemen Lengkap), Lambang Negara, Pancasila, Piagam Jakarta, Dekrit Presiden, Proklamasi, Sumpah Pemuda, Supersemar, MPPRI, DPRRI*, (Jakarta: Triana Media, 1014), Cet. ke-1, [perubahan dalam satu naskah], h. 102

⁷⁷⁷ Syaifuddin Zuhri, *Mengilangkan*, h. 25.

⁷⁷⁸ Penjelasan lebih lanjut, simak, Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, h. 59, dalam, Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta*, h. 97.

istilah Bung Hatta, pijakan “pokok dari yang pokok.” Eksistensi agama dan negara dalam konteks Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bagaikan eksistensi sebuah “gunting,” bila salah satu bagiannya dilepas, fungsinya pun menjadi hilang.⁷⁷⁹

Hakikat agama adalah ada pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁸⁰ Maka, rumusan Pasal 29 ayat 1, *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Esa*, adalah cermin dari prinsip *Tauhid* yang menjadi salah satu dari tiga *mission sacree*—pembebasan, persamaan, dan persaudaraan—terpenting yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, pada periode awal beliau melakukan perubahan sosial di kota Makkah. Langkah terpenting yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di awal perjuangannya itu adalah, “melakukan pembebasan masyarakat dari tirani *paganisme* (penyembah berhala) dan mengembalikan masyarakat ke dalam sistem keimanan yang lebih rasional, sejalan dengan *fitrah* kejadian manusia. Hal ini sesuai dengan sabda termasyhur Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تَنْتُجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَاءً

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?⁷⁸¹

Prinsip *fitrah* kejadian manusia dapat disimpulkan dari al-Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 172 yang menyebutkan:

⁷⁷⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 135.

⁷⁸⁰ Nurcholish Madjid, *Islam*, h. 79.

⁷⁸¹ Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Juz I, h. 585.

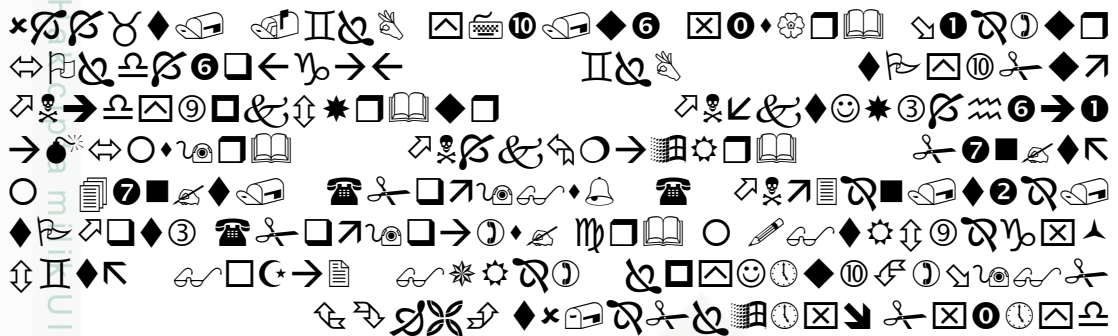
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".⁷⁸²

Hal yang sama juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ash-Syams (91) ayat:

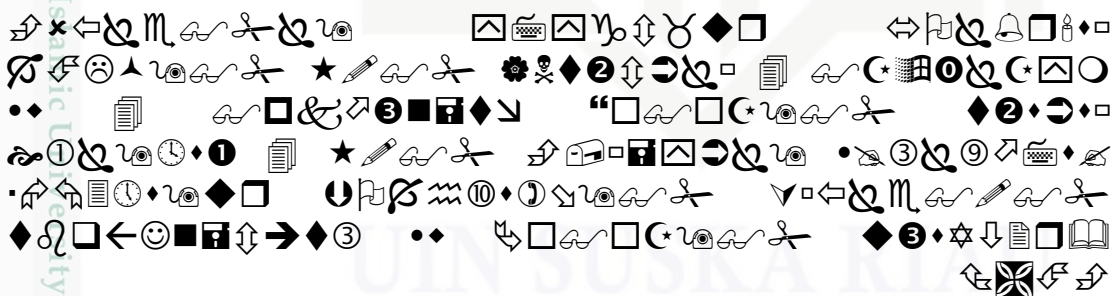
7-8 sebagai berikut :



Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaanannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.⁷⁸³

Hal yang sama juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat: 30

sebagai berikut :



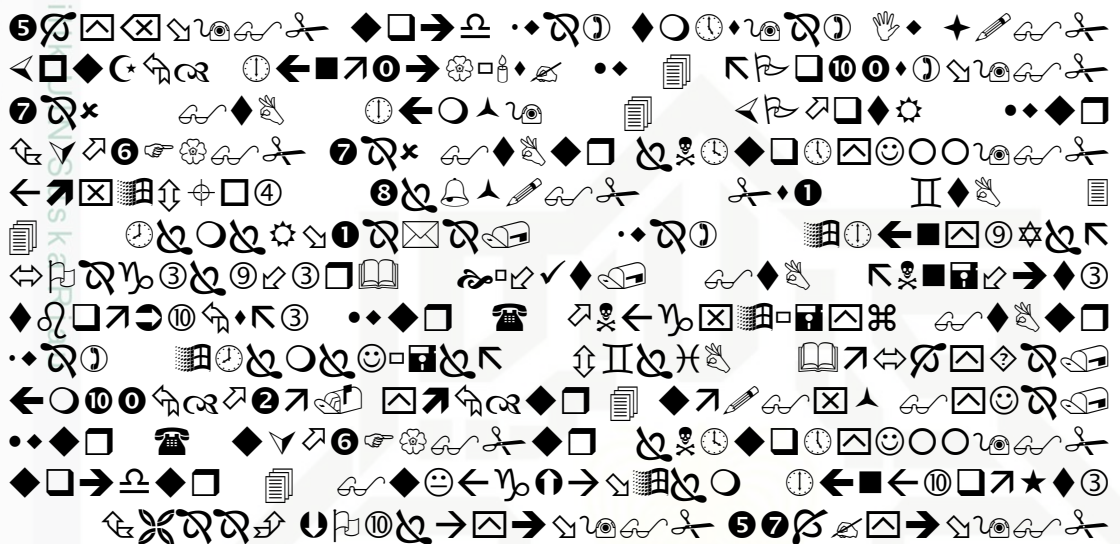
Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁷⁸⁴

⁷⁸²Departemen Agama, *Al-Qur'an*, Juz IX. h. 232.

⁷⁸³*Ibid*, *Al-Qur'an*, Juz XXX. h. 896.

⁷⁸⁴*Ibid*, Juz XXI, h. 574.

Sistem keimanan yang lebih rasional yang sesuai dengan fitrah manusia, bersendikan pada prinsip-prinsip *tawhid* (keesaan Allah), disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 255 sebagai berikut:



Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷⁸⁵

Sistem Tauhid ini, dapat juga dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ikhlâs (112) ayat 1-4 sebagai berikut:



Artinya: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".⁷⁸⁶

Ide *tawhid*—tiada Tuhan kecuali Allah—yang ditawarkan Rasulullah SAW sebagai langkah “pembebasan” manusia dari *tirani paganisme* (belenggu

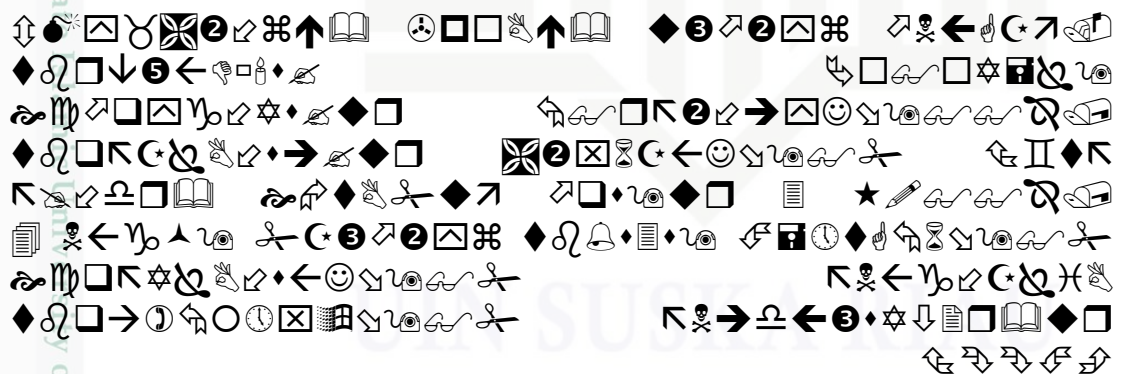
⁷⁸⁵ Ibid, Juz III, h. 52-53.

⁷⁸⁶ Ibid, Juz XXX, h. 922.

kemusyrikan) masyarakat Makkah adalah yang paling pertama dan utama. Ide *tawhid* memberikan implikasi moral yang sangat luas, radikal, dan fundamental terhadap nilai-nilai sosial pada masyarakat Makkah. Sumber kekacauan nilai yang menjadi tumpuan “pembebasan” Muhammad SAW atas masyarakatnya adalah ide *tawhid* itu.

Karenanya, masuk akal bahwa di saat ide ini diperkenalkan oleh Rasulullah kepada masyarakat Quraisy Makkah yang masih *paganis* (penyembah berhala), serta merta ide ini pun langsung menghadapi penolakan (*resistensi*) luar biasa keras dan tajam. Muhammad SAW dianggap oleh masyarakat Makkah sebagai “perusak” sembah nenek-moyang mereka. Abu Lahab bahkan menyumpahinya sebagai “manusia celaka” yang sedang mengutuk “kegelapan” langit Makkah.⁷⁸⁷

Kehadiran Muhammad SAW dalam proses “pembebasan nilai-nilai sosial” ini, dijamin oleh Allah bahwa, “Kamu adalah *umat terbaik* yang pernah dimunculkan ke pentas sejarah manusia, untuk menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan, serta percaya kepada Allah. Hal ini sesuai Al-Qur’an Surat Ali Imran (3) ayat 110:



Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁷⁸⁸

⁷⁸⁷ Muhammad Husain Haekal, *Hayât*, h. 94.

⁷⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: IV, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

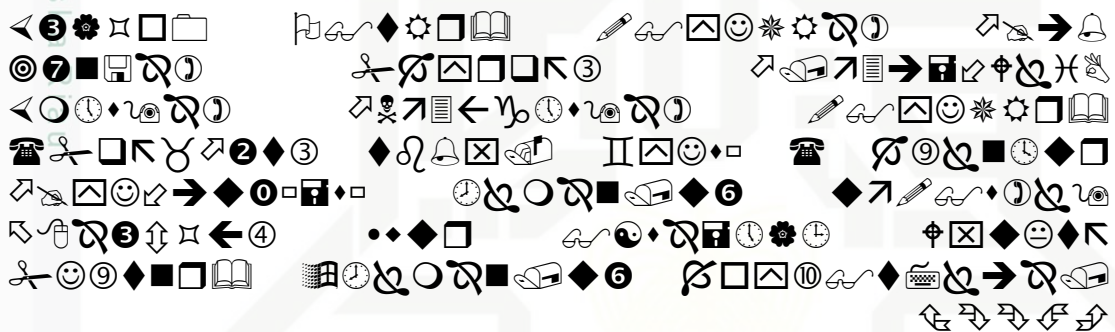
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

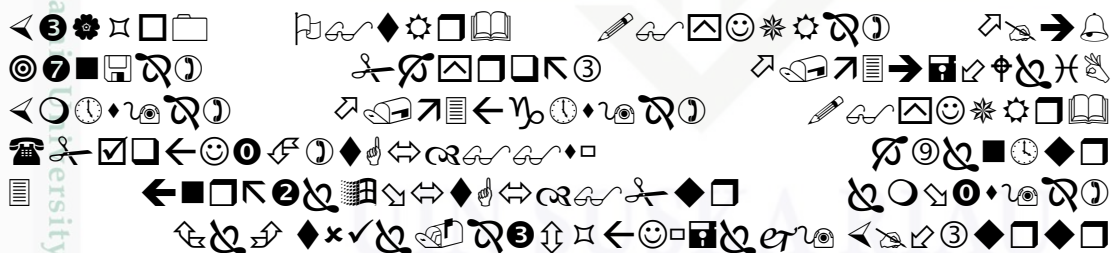
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi Nabi Muhammad saw sendiri, ditegaskan oleh Allah bahwa beliau hanyalah manusia biasa, namun menerima wahyu langsung dari Allah, sang Maha Pencipta, untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) ayat 110 sebagai berikut :



Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".⁷⁸⁹

Hal ini juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Fushshilat (41) ayat 6 sebagai berikut :

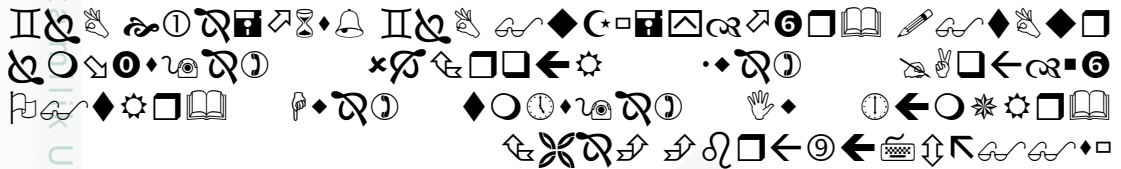


Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya".⁷⁹⁰

⁷⁸⁹Ibid, Juz: IV, h. 80.

⁷⁹⁰Ibid, Juz: XXIV, h. 684 .

sebagai berikut :



Artinya: "Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".⁷⁹¹

Kelanjutan langsung dari ide *tawhid* ini adalah “pengakuan atas kehadiran Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya.” Ide inilah kemudian dikenal sebagai kalimat *syahâdat*: “Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.” Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلعم: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وانّ محمّدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحجّ، وصوم رمضان.

*Artinya: Hadits diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Islam itu ditegakkan di atas lima perkara, (1) mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mengakui pula bahwa Muhammad adalah Rasulullah, (2) melaksanakan shalat, (3) membayar zakat, (4) menunaikan ibadah haji, dan (5) berpuasa di bulan Ramadhan).*⁷⁹²

Hal yang sama juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar dari Umar Ibn Khatthab sebagai berikut:

عن يحيى بن يعمر عن عبدالله بن عمر وعن عمر بن الخطاب قال: ... يا محمد، أخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسلام

⁷⁹¹*Ibid*, Juz: XVII, h. 451.

⁷⁹²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz Awwal, khusus hadits nomor 06.

ان تشهد ان لا اله الا الله وانّ محمّدا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحجّ البيت ان استطعت اليه سبيلا.

Artinya: Hadits diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, dari Abdullah bin Umar, dan dari Umar bin al-Khaththab, Rasulullah saw bersabda: "Ya, Muhammad! Terangkan kepadaku tentang Islam! Nabi saw menjawab, "Islam adalah: (1) kamu mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu mengakui pula bahwa Muhammad adalah Rasulullah, (2) kamu mendirikan shalat, (3) kamu membayar zakat, (4) kamu berpuasa di bulan Ramadhan, (5) dan kamu pun pergi haji ke Batullah, jika kamu sanggup melaksanakannya."⁷⁹³

Inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah menanamkan keyakinan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Yaitu, keyakinan kepada adanya hidup jangka panjang, khususnya hidup sesudah kematian di Hari Kemudian, dan kepada adanya tanggung jawab pribadi yang mutlak di hadapan Allah pada Hari Kemudian, atas segala amal perbuatan manusia dalam hidup jangka pendek, yakni dunia ini. Maka, siapa pun di antara manusia yang berpegang pada sendi-sendi ajaran itu, akan memperoleh kebahagiaan hidup, tak perlu khawatir maupun bersedih dalam kehidupannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hal ini sesuai Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 62 berikut:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ جَاهِلًا زَانٍ أَوْ فَاسِقًا فَمَنَّبَهُ امْرَأَتُهِ فَمَا يَعْلَمُ بِمَا امْرَأَتُهُ تُفْتِنُهُ فَتًى يَنزِفُ مِنْهُ غَدْرًا وَإِنَّهَا لَكَبْشَرٌ لَّا يَعْلَمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ جُرْجُمًا فَلَا مَنَاصَ لَهُ إِلَّا جُنْدَ الْمَلَكِ ۖ وَسَاءَ مَا يَصِفُونَ ۚ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁷⁹⁴

⁷⁹³Muslim, *Shaheh Muslim*, Juz I, h. 87.

⁷⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: I, h. 12.

Hal yang sama juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maaidah (5) ayat

69 sebagai berikut:



Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁷⁹⁵

Bahwasanya, di hadapan manusia tersedia dua pilihan jalan hidup. *Pertama*, jalan hidup yang benar, yang bakal mempertahankan ketinggian martabat kemanusiaan. Inilah jalan Tuhan, yakni jalan hidup karena iman, yang mengejawantah dalam tindakan yang baik, atau amal saleh. *Kedua*, jalan hidup tanpa iman dan amal saleh, yang menuju pada penghancuran harkat dan martabat manusia, dikarenakan perbudakan dan penghambaan oleh sesama manusia, maupun sesama makhluk, yang menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan. Inilah jalan hidup yang disemangati oleh tirani (*tughyân*) yang merampas kebebasan manusia.⁷⁹⁶

Beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disebut sebagai jalan hidup yang bakal mempertahankan ketinggian martabat manusia. Berpegang pada semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu, dengan sendirinya akan membawa dampak “pembebasan” pada nilai-nilai sosial yang bergerak secara *destruktif*, yakni nilai-nilai yang merusak prinsip kemanusiaan universal. Prinsip *tawhid* inilah yang akan

⁷⁹⁵*Ibid*, Juz: VI, h. 159.

⁷⁹⁶Nurcholish Madjid, *Islam*, h. 51.

memberikan efek “pembebasan” manusia dari segala perbuatan yang membawa dia kepada pengingkaran harkat dan martabat kemanusiaannya sendiri.⁷⁹⁷

Dampak “pembebasan” itu dimulai oleh adanya keyakinan dan keinsyafan yang setinggi-tingginya bahwa Allah Yang Maha Esa itu, berada di atas manusia. Sebagai makhluk tertinggi yang diangkat untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi, manusia hanya tunduk kepada Allah, juga sekalian makhluk yang lain, termasuk para malaikat, harus mengakui kekhalifahan manusia. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk bebas, di mana dengan daya kreativitasnya sendiri bertanggung jawab untuk mengemban tugas kekhalifahannya untuk membangun bumi, sebuah tempat paling indah bagi manusia untuk hidup dan berkembang. Manusia pun harus bertanggung jawab atas peran kekhalifahan yang dipercayakan kepadanya itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am (6) ayat 165, sebagai berikut:



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁹⁸

Merujuk pada berbagai penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa “percaya kepada Allah itu tidaklah dengan sendirinya berarti *tawhid*.” Sebab, percaya

⁷⁹⁷ Ibid.

⁷⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, Juz: VIII, h. 202.

kepada Allah SWT itu mengandung kemungkinan “percaya kepada yang lain bersama Allah dalam keilahiaan itu.”⁷⁹⁹ Dan inilah sebenarnya problem terbesar manusia.

Memang, manusia pada umumnya percaya kepada Allah (Tuhan), tetapi tidak *murni* (sejati, esa, satu), sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf (12) ayat 103-106:

وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا بَعْضَ مَا تُدْعَىٰ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَاسِعٌ لِّمُؤْمِنِيهِمْ ۚ
يَوْمَ يُنَادِي الْمَلَائِكَةُ سَبِّحُوا لِلَّهِ أَكْبَرًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَاسِعٌ لِّمُؤْمِنِيهِمْ ۚ

Artinya: Sebagian besar manusia itu, betapa pun engkau (Muhammad) inginkan, tidaklah mereka akan beriman. Padahal engkau tidak meminta mereka upah sedikit pun. Ini tidak lain adalah peringatan untuk seluruh alam. Dan betapa banyak ayat di seluruh langit dan bumi yang lewat kepada mereka, tetapi mereka tetap berpaling. Dan mereka itu, selain beriman kepada Allah, mereka juga bersikap syirik (beriman kepada yang lainnya).⁸⁰⁰

Jika kita melakukan *verifikasi* (pembuktian) lebih lanjut atas *justifikasi* (pembenaran) al-Qur’an tentang sikap percaya kepada Allah SWT sekaligus melakukan praktik-praktik *syirik*, tentu kita juga harus mengutip ayat lain yang memberikan *verifikasi* (pembuktian) tersebut. Misalnya, firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Az-Zumar (39) ayat 38 yang menegaskan:

وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا بَعْضَ مَا تُدْعَىٰ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَاسِعٌ لِّمُؤْمِنِيهِمْ ۚ
يَوْمَ يُنَادِي الْمَلَائِكَةُ سَبِّحُوا لِلَّهِ أَكْبَرًا ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَاسِعٌ لِّمُؤْمِنِيهِمْ ۚ

⁷⁹⁹Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin*, h. 78.

⁸⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, Juz: XIII, h. 333-334.

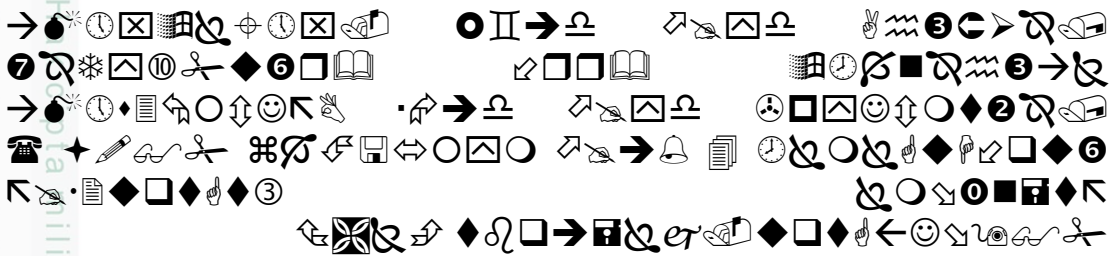
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



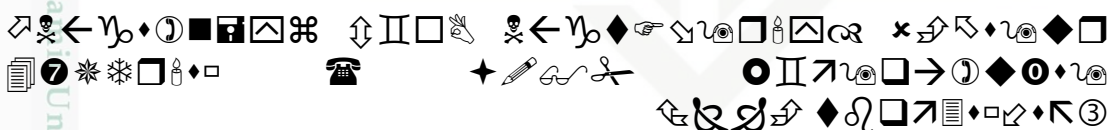
Artinya: Dan sungguh jika kamu (Muhammad) menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi?' pastilah mereka akan menjawab, 'Allah!' Katakanlah, 'Apakah telah kamu renungkan sesuatu (berhala) yang kamu seru (sembah) selain Allah itu? Jika Allah menghendaki bahaya atasku, apakah mereka (berhala-berhala itu) mampu melepas-kannya?' Dan jika Allah menghendaki rahmat untukku, apakah mereka (berhala-berhala itu) mampu menahan rahmat-Nya? Katakanlah (Muhammad): 'Cukuplah bagiku Allah (saja); kepada-Nyalah bertawakal bagi (mereka) yang mau bertawakal.'⁸⁰¹

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut (29) ayat 63:



Artinya: Dan sungguh jika kamu (Muhammad) menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menurunkan air (hujan) dari langit, sehingga dari air itulah dihidupkanlah bumi (tanah) sesudah kematiannya (kekeringan)?' Pastilah mereka akan menjawab, 'Allah!' Katakanlah: 'Alhamdulillah!' Tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal.'⁸⁰²

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf (43) ayat 87:



Artinya: Dan jika kamu (Muhammad) menanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka (makhluk sembah selain dari Allah) itu?' Mereka (orang-orang kafir itu), pasti akan menjawab, 'Allah!' Maka bagaimana mereka bisa terpalingsan (dari kebenaran)?⁸⁰³

Rentetan ayat demi ayat di atas, menggambarkan dengan jelas tentang kebenaran simpulan di muka, bahwa "percaya kepada Allah saja bukanlah dengan

⁸⁰¹ Ibid, Juz: XXIV, h. 664.

⁸⁰² Ibid, Juz: XXI, h. 568.

⁸⁰³ Ibid, Juz: XXV, h. 712.

sendirinya berarti *tawhid*.” Oleh karena itu, percaya kepada Allah adalah gejala keyakinan universal seluruh umat manusia, berdasarkan “perjanjian primordial” yang disepakati oleh Allah SWT bersama manusia sejak zaman azalnya, sebagaimana telah penulis jelaskan di muka. Tetapi, percaya kepada Allah selalu diselubungi oleh *mitos*, *kultus*, maupun *dongeng*, yang mengganggu “kemurnian” dalam beragama, yaitu bertuhan kepada Allah Yang Maha Esa.⁸⁰⁴

Benar bahwa ada di antara manusia yang tidak percaya sama sekali kepada Allah. Mereka ini secara teknis disebut sebagai kaum *ateis* (tidak bertuhan atau tidak beragama). Namun, apakah mereka benar-benar tidak bertuhan atau tidak beragama? Verifikasi ilmiah menunjukkan bahwa ternyata mereka juga sesungguhnya bertuhan atau beragama dalam bentuk lain, yakni bertuhan atau beragama kepada “pemimpin, ideologi, dan ajaran” mereka sendiri. Mereka bertuhan kepada “pemimpin mereka” (Stalin dan Lenin), mereka beragama kepada “ideologi Komunis,” mereka beriman kepada “ajaran Sosialis.”⁸⁰⁵

Terbukti bahwa begitu Uni Sovyet runtuh, seluruh bangunan ideologi Komunis dengan segala ajaran Sosialisnya, ikut ambruk dimakan sejarah, hanya menjadi catatan kehancuran sebuah peradaban yang dibangun di atas penolakan terhadap agama-agama formal.⁸⁰⁶ Lebih jauh, mereka sebenarnya bukan menolak kehadiran sebuah agama formal (percaya kepada Allah atau Tuhan), melainkan lebih dalam dari itu, yakni mereka sebenarnya hendak menolak adanya prinsip *Tawhid* (Kemahaesaan Allah). Karenanya, *ateisme* pada hakikatnya adalah *politeisme* dalam

⁸⁰⁴Nurcholish Madjid, *Islam*, h. 79

⁸⁰⁵*Ibid.*

⁸⁰⁶*Ibid.*



bentuk modern. Malahan, para ilmuwan sosial menyebut komunisme atau ateisme sebagai “padanan agama” (*religion equivalent*).⁸⁰⁷

Oleh karena itu, kehadiran Rasulullah SAW dengan semangat pembebasan manusia dari belenggu *politeisme* (kemusyrikan), pada hakikatnya beliau melakukan proses pembebasan itu melalui dua sikap yang sangat fundamental: mendesak manusia untuk melepaskan diri dari “kepercayaan yang palsu” (*al-bâthil*); kemudian mengajak manusia untuk meneguhkan diri, dengan menghadapkan “wajahnya” hanya kepada “kepercayaan yang benar” (*al-Haq*). Itulah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka, tugas utama yang diemban Rasulullah SAW adalah membebaskan manusia dari belenggu “paham tuhan banyak” sambil mencanangkan dasar kepercayaan kepada “paham Tuhan Satu” yang dirumuskan dalam kalimat *al-naftiy wa al-itsbât* (negasi-afirmasi): “tidak ada Tuhan kecuali Allah.”⁸⁰⁸

Dengan “negasi” (peniadaan) itulah maka dimulai proses pembebasan dari belenggu “kepercayaan palsu” sambil melakukan “afirmasi” (peneguhan) kepada “kepercayaan benar.” Sebab, hidup tanpa kepercayaan sama sekali adalah *absurd* (mustahil).⁸⁰⁹ Sebagaimana ditunjukkan oleh *eksperimen* Komunisme yang gagal, seperti telah disinggung di atas, bahwa boleh jadi seseorang memulai hidup dengan tanpa kepercayaan sama sekali. Namun, melalui kekosongan kepercayaan itu, justru akan memberi tempat bagi timbulnya “kepercayaan baru” yang jauh lebih mencekam dan membelenggu, seperti diekspresikan dengan kejam oleh kekuasaan Komunisme yang *represif* dan *tiranik* itu.⁸¹⁰

⁸⁰⁷ *Ibid.*

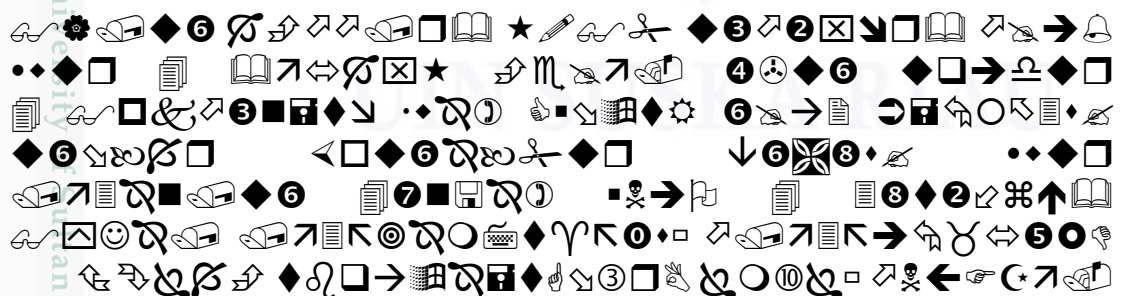
⁸⁰⁸ *Ibid.*

⁸⁰⁹ *Ibid.*

⁸¹⁰ *Ibid.*

Konon, mitologi kepada sesama manusia menghasilkan *kultus* dan *tirani*, baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang kehidupan sosial yang lain, termasuk dalam bidang kehidupan keagamaan.⁸¹¹ Disebabkan oleh efek pembebasannya yang menghancurkan martabat manusia, maka *syirik* (paham tuhan banyak), disebutkan sebagai dosa terbesar manusia yang tidak akan terampuni, sampai *syirik* itu ditinggalkan sama sekali oleh pelakunya.⁸¹² Sebaliknya, melalui Kitab Suci, kita menemukan bahwa prinsip *Tawhid* (Keesaan Allah), langsung dikontraskan dengan penolakan terhadap prinsip *thâghûl* (sikap tiranik). Maka, berbagai konsekuensi logis dari paham Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satu dampak pembebasan sosial yang terbesar dalam sejarah manusia, adalah hadirnya prinsip *egaliterianisme* (persamaan derajat) yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁸¹³

Bertumpu pada prinsip “persamaan derajat” (*egaliterianisme*) maka *tauhid* menghendaki adanya perubahan struktur sosial secara terbuka, adil, dan demoktaris, tidak lagi berdasarkan nasab dan keturunan, tidak juga berdasarkan tanggung jawab kesukuan atau kelompok, melainkan tanggung jawab pribadi secara mutlak di hadapan mahkamah Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am (6) ayat 164, sebagai berikut:



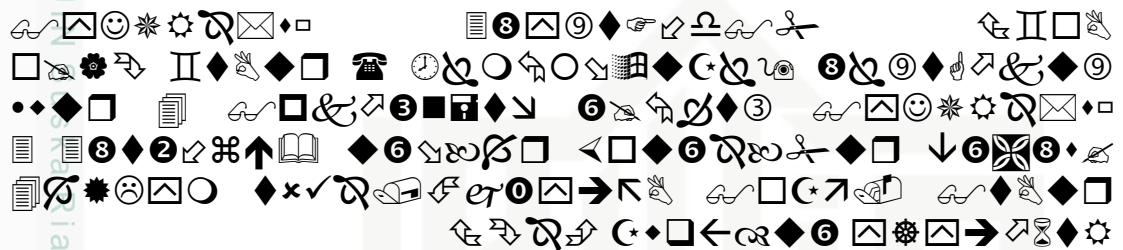
⁸¹¹ *Ibid.*

⁸¹² *Ibid.*, h. 87.

⁸¹³ *Ibid.*

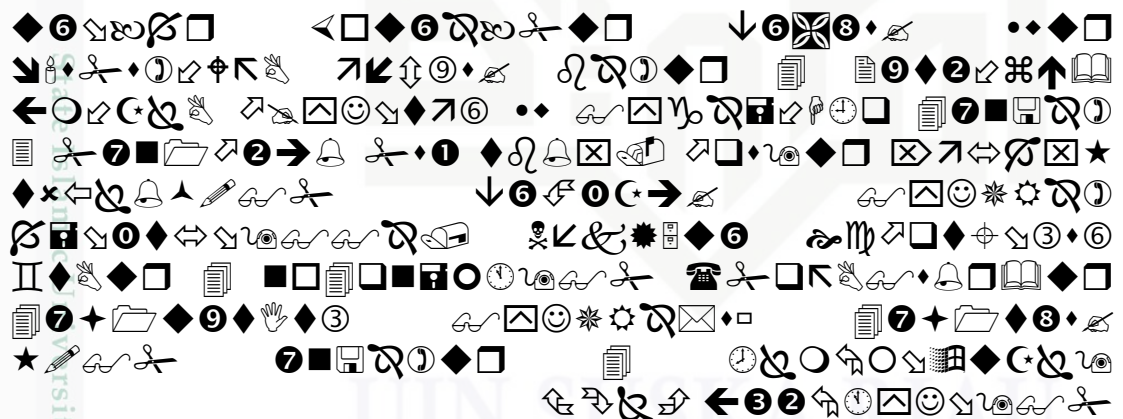
Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan"⁸¹⁴

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 15, sebagai berikut:



Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁸¹⁵

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Fatir (35) ayat 18, sebagai berikut:



Artinya: "Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".⁸¹⁶

⁸¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: VIII, h. 202.

⁸¹⁵*Ibid*, Juz: XV, h. 386.

⁸¹⁶*Ibid*, Juz: XXII, h. 619.

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Zumar (39) ayat

8, sebagai berikut:



Artinya: Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka".⁸¹⁷

Posisi Makkah sebagai *epicentrum* sosial-ekonomi-budaya masyarakat

Quraissy, nampaknya dijalankan dengan ikatan kesukuan yang sangat kuat, dan masing-masing suku memiliki anggota setia yang dibangun secara *fanatic*. Juga, di dalam struktur sosial tersebut, sistem kekeluargaan yang dikembangkan secara *patriarkhi* (mengandalkan otoritas lelaki), membuat kehadiran perempuan di tengah masyarakat hanya sebagai “pelengkap” dalam ruang kehidupan laki-laki.⁸¹⁸

Bahkan, keserakahan dalam melakukan poligami pun kian hari kian mewabah di tengah masyarakat, perempuan diperlakukan sebagai milik pribadi yang bisa dengan gampang dipertukarkan dan diperjualbelikan. Dalam struktur sosial yang timpang seperti itulah, muncul kebiasaan menguburkan anak perempuan secara

⁸¹⁷ *Ibid*, Juz: XXIII, h. 659.

⁸¹⁸ Yusron Razak dan Nawiruddin, *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*, (Jakarta: LSA, 2013), Cet ke-4, h. 202-203.

hidup-hidup, sebagai bentuk pengukuhan otoritas lelaki atas perempuan, sambil menindas perempuan secara sewenang-wenang.

Karenanya, Rasulullah dengan kewibawaan yang dimilikinya, mulai melakukan perubahan pada struktur sosial *ashabiyyah*, dimana ikatan kemasyarakatan (solidaritas sosial) dibangun berdasarkan sentimen darah, keturunan, maupun kesukuan,⁸¹⁹ diganti dengan ikatan keislaman, diwujudkan melalui prestasi kerja, amal saleh, dan kualitas ketakwaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 13, sebagai berikut:



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸²⁰

Merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah inilah, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H/1328 M) benar ketika menggambarkan prinsip *egalitarianisme* Islam yang ditawarkan oleh Nabi SAW ini, dengan mengatakan bahwa,

اعتبار في الجاهلية بالأنصاب, واعتبار في الاسلام بالأعمال

(Penghargaan di masa Jahiliyah dengan nasab (prestise), tetapi penghargaan di masa Islam dengan amal (prestasi).⁸²¹

⁸¹⁹ Ibid.

⁸²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: XXVI, h. 745.

⁸²¹ Nurcholish Madjid, *Islam*, h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karena itu, di zaman Islam, semua manusia sama derajatnya di depan Allah, sama pula posisinya di depan hukum. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Perubahan struktur sosial Islam itu dimaksudkan sebagai upaya meletakkan prinsip-prinsip egalitarianisme dan kosmopolitanisme dalam Islam, yaitu memandang posisi semua manusia sama derajatnya di mata Allah—baik bangsa Arab maupun bangsa `Ajam (non Arab), baik kulit hitam, merah, ataupun putih. Maka beliau dengan tegas menghapus sistem perbudakan, penghormatan pada hak-hak wanita pun dipulihkan, hak-hak buruh pun dijamin dan nasib mereka diperhatikan secara layak, setara dengan majikan yang selama ini memerlakukan mereka secara kejam, sampai di luar batas perikemanusiaan. Hal ini sesuai Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 13:



Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸²²

Ide ini menggambarkan dengan jelas tentang bagaimana seharusnya manusia hidup tanpa kelas sosial, tanpa perbedaan hirarki dan struktur sosial yang saling menistakan dan meniadakan. Rasulullah menegaskan sikap “persamaan derajat” (*egalitarianisme*) ini, tampak jelas dalam seruannya yang ditujukan kepada bangsa Arab, bangsa Quraisy, qabilah Abdul Manaf, maupun seluruh umat manusia. Melalui kalimat yang jelas, tegas, dan penuh harapan, beliau menjabarkan prinsip-prinsip

⁸²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: XXVI, h. 745.

Wahai manusia! Sesungguhnya, Tuhan kamu satu. Dan sesungguhnya ayah kamu pun satu. Setiap kalian adalah keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan bangsa Arab tidak lebih unggul daripada bangsa Ajam, bangsa Ajam pun tidak lebih unggul daripada bangsa Arab, ras merah tidak lebih unggul daripada ras putih, kecuali takwa.⁸²³

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁸²⁴

⁸²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: IV, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sinilah mengapa beliau secara khusus memersoalkan ketidakadilan hukum yang berlaku pada sekelompok umat manusia terdahulu, karena mereka memberlakukan hukum berdasarkan stratafikasi sosial—tinggi-rendahnya kasta dan jabatan yang ada di tengah masyarakat—seperti dikutip oleh Ibnu Rusyd (w. 520 H/1128 M) dalam kitabnya yang sangat terkenal, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Qutaibah ibnu Sa'id, sebagai berikut:

قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Sesungguhnya, telah binasa orang-orang pada zaman sebelum kamu, bahwa apabila orang-orang terhormat yang mencuri, mereka biarkan hukum tak berlaku; dan apabila orang-orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan hukum itu. Demi jiwaku di tangan-Nya! Jika yang mencuri itu Fathimah binti Muhammad, maka aku sendirilah yang akan me-motong tangannya.⁸²⁵

Lebih jauh, sesungguhnya, Rasulullah SAW hendak memperingatkan manusia bahwa ada dua golongan manusia yang selalu hadir untuk memandu jalannya sejarah. Apabila keduanya baik maka baiklah perjalanan sejarah manusia dan apabila keduanya buruk maka buruklah perjalanan sejarah manusia. Keduanya itu adalah para ilmuwan ('ulamâ', perancang undang-undang) dan para penguasa (umarâ', pelaksana undang-undang).⁸²⁶ Kedua golongan inilah menjadi tonggak perubahan sejarah kehidupan manusia, baik positif (*shâlih*) maupun negatif (*fâsid*).

⁸²⁵ Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Juz XI, h. 294.

⁸²⁶ Hadits itu selengkapnya berbunyi; "Shinwânu min ummatiy idzâ shalahâ shalaha al-nâsu, waidza fasadâ fasada al-nâsu: al-'ulamâ' wa al-umarâ'—Ada dua golongan dari ummatku apabila keduanya baik maka baiklah manusia, dan apabila keduanya buruk maka buruklah manusia, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip “persamaan derajat” adalah *fundamental law* (hukum dasar) dalam proses penegakan keadilan. Berangkat dari prinsip persamaan derajat inilah, setiap orang menemukan dirinya “sama di depan hukum.” Ucapan paling terkenal yang mencerminkan prinsip penegakan keadilan sebagai perwujudan dari “asas persamaan derajat” di depan hukum adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw, “Jika Fathimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendirilah yang akan memotong tangannya.”⁸²⁷ Inilah doktrin “hukum pidana Islam” (*fiqh jinayah*) yang telah diterapkan oleh Rasulullah menjadi hukum positif di zamannya. Di sini, makna hukum positif di zaman Rasulullah berarti hukum yang telah diberlakukan oleh Rasulullah di tengah masyarakat dengan bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits. Di Indonesia, sampai dengan tulisan ini dibuat, hukum pidana Islam belum menjadi hukum positif yang berlaku dalam undang-undang negara.

Sebelum hukum Islam dapat berlaku, Negara harus dibebaskan dari segala belenggu tirani syirik (*thaghut*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl (16) ayat 36, sebagai berikut:



Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu

ulama (ilmuwan, perancang undang-undang) dan umara (penguasa, pelaksana undang-undang).” (HR. Ibnu `Abdil Barri dan Abu Na`im, dari Ibnu `Abbas ra). Keterangan lebih lanjut, simak yang diberikan oleh, Umar Hasjim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, Cet. ke-2 (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1979), h. 201

⁸²⁷Ibn Rusyd, *Bidâyatul*, h. 334

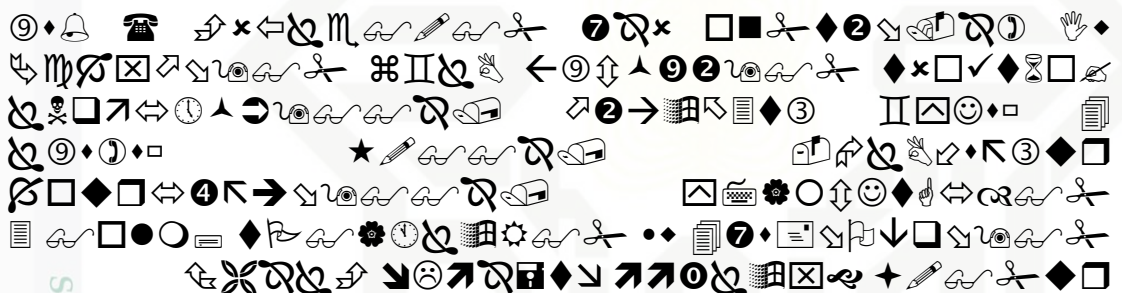
ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).⁸²⁸

Hal ini juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 2, sebagai berikut:



Artinya: Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku."⁸²⁹

Hal ini juga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256, sebagai berikut:



Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸³⁰

Maka, bunyi Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 itu, mengandung makna “pembebasan Negara” dari berbagai belenggu “berhala” (*thaghut*) berupa: tokoh, kekuasaan, harta, maupun idiologi (ajaran politik), dan mengembalikan orientasi bernegara hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai satu-satunya Zat yang wajib disembah dan ajaran-ajaranNya wajib dijadikan sebagai acuan nilai dalam

⁸²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: XIV, h. 369.

⁸²⁹*Ibid*, Juz: XV, h. 383.

⁸³⁰*Ibid*, Juz: III, h. 53.

berbangsa dan bernegara.⁸³¹ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perintah konstitusi yang terkandung dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 itu. Perintah konstitusi ini menjadi salah satu sumber pokok dalam positifisasi hukum pidana Islam menjadi hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Adapun Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, mengatur bagaimana Negara menjamin masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ajaran dan kepercayaan yang dianutnya itu sebagaimana mestinya. Itu berarti, dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, jaminan Negara tentang posisi agama dalam konstitusi itu sudah lebih dari cukup untuk menerapkan syariat Islam—baik perdata maupun pidana—tanpa perlu terobsesi mendirikan “Negara Islam” model NII-nya Kartosuwirjo di Jawa Barat,⁸³² Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan,⁸³³ Daud Beureueh di Aceh.⁸³⁴ Semua perjuangan untuk mendirikan “Negara Islam” itu, rupanya dimaksudkan agar bisa menerapkan syariat Islam di Indonesia. Inilah kelirunya!

Salah paham yang berjalan selama ini adalah banyak kalangan menilai, dengan kembali kepada Piagam Jakarta, berarti kita akan mendirikan Negara Islam di Indonesia. Lebih parah lagi adalah salah paham tentang penerapan syariat Islam bisa dilakukan kalau adanya Negara Islam. Padahal, sejak UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sejak itu pula Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 berlaku.⁸³⁵

Maka mulai saat itu, umat Islam Indonesia sudah *wajib* menerapkan syariat Islam di

⁸³¹Nurcholish Madjid, *Islam, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, h. 48

⁸³²Soal ini, baca buku, *Politics of Identity: The Challenge of Modern Fundamentalism*, Edisi Indonesia dengan judul, *Politik Identitas: Tantangan Terhadap Fundamentalisme Modern*, (Jakarta: Pemuda Muhammadiyah & FES, 2004)

⁸³³Soal ini baca buku, Abdul Kahar Muzdakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, (Jakarta: madinah Press, 1999)

⁸³⁴Soal ini baca buku, Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia Modern*, (Jakarta: Teplok Press, 1999)

⁸³⁵Ismail Sunny, “Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional,” *Panjimas*, No 486, Th. XXVII, Rabiul Awal 1406 H/21 November 1985, h. 18

Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum pidananya. Persoalannya adalah umat Islam tidak siap dengan seperangkat undang-undang pelaksanaannya—terutama hukum pidana Islam—untuk dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸³⁶

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”⁸³⁷ Artinya, secara negatif, dapat dikatakan bahwa Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ini hendak mengatakan bahwa bagi setiap penduduk Indonesia yang tidak menjalankan hukum berdasarkan agama dan kepercayaannya, maka dia sebenarnya telah jelas-jelas melanggar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maaidah (5) ayat 44-47, yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia tergolong *kafir*, *dzalim*, dan *fasik*.”. Ayat tersebut sebagai berikut:

“Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia tergolong *kafir*, *dzalim*, dan *fasik*.”. Ayat tersebut sebagai berikut:

⁸³⁶ Sayuti Thalib, “Perlu Politik Hukum Baru,” *Panjimas*, No 486, Th. XXVII, Rabiul Awal 1406 H/21 November 1985, h. 16; lihat juga keterangan, Harmail Y. Ibrahim, “Antara Keadilan dan Kepastian Hukum,” *Panjimas*, No 486, Th. XXVII, Rabiul Awal 1406 H/21 November 1985, h. 14-15.

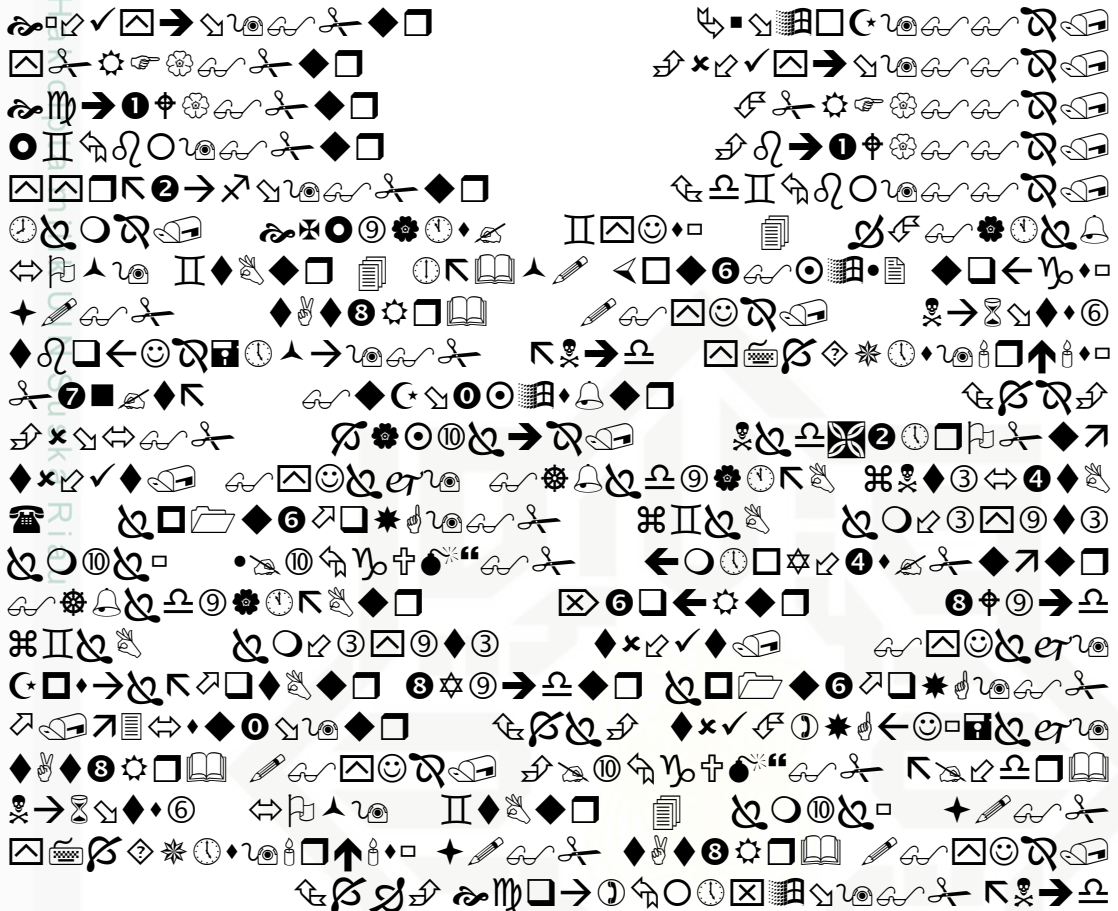
⁸³⁷ Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: (44) Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (45). Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (46). Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (47). Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.⁸³⁸

⁸³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: VI, h. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara positif, dapat ditegaskan bahwa Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ini, secara *eksplisit* (tegas) memerintahkan kepada Negara untuk membuat undang-undang organik yang mengatur tentang pelaksanaan hukum-hukum agama bagi masing-masing pemeluk agama, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tersebut. Hal ini sesuai Al-Qur'an Surat Al-Kafirun (109) ayat 4-6, sebagai berikut:



Artinya: (4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (5). dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (6). Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".⁸³⁹

Oleh karena itu, menjadi kewajiban umat Islam untuk mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana nasional yang bersumber pada hukum pidana Islam. Sejarah penerapan hukum pidana Islam di Nusantara telah membuktikan itu.

Di sinilah, sesuai dengan perintah Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ini, dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia, arti penting dari peringatan Bung Karno dan Bung Hatta sejak awal disahkan UUD 1945 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, jelas menganjurkan dengan penuh kesungguhan hati bahwa "jalan masuk" bagi bersemayamnya syariat Islam secara terhormat di bumi Indonesia adalah "Parlemen."⁸⁴⁰ Melalui parlemenlah cita-cita penerapan syariat Islam dapat diwujudkan. Maka kesiapan para politisi Islam dalam memahami peta masalah, sekaligus memiliki kemampuan akademik memadai dalam merumuskan prinsip-

⁸³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, Juz: XXX, h. 919.

⁸⁴⁰B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Edisi Indonesia oleh Saafruddin Bahar, dengan judul, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), Cet ke-1, h. 134-135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dan nilai-nilai moral al-Qur'an dan al-Hadits ke dalam bentuk rancangan undang-undang negara (*qânûn*) adalah keharusan.⁸⁴¹

Mengingat bahwa rancangan undang-undang yang bermaterikan syariat Islam itu akan dibahas dan diuji secara akademik maupun politik dalam forum Dewan Perwakilan Rakyat—apalagi melalui sebuah mekanisme politik yang tidak ringan—maka diperlukan kesiapan materi hukum yang benar-benar mampu meyakinkan anggota parlemen dari berbagai fraksi itu. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia, bahwa bila rancangan undang-undang yang bermaterikan syariat Islam tersebut disetujui oleh DPR kemudian disahkan oleh Presiden dalam lembaran negara, otomatis undang-undang tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai hukum positif yang siap ditegakkan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁴²

Itulah sebabnya, mata rantai kehadiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1945, serta Pasal 29 UUD 1945, menjadi jaminan autoritaif penerapan syariat Islam di Indonesia. Jaminan itu, suka ataupun terpaksa, harus diterima sebagai kenyataan sejarah yang tak perlu disesali. Tugas kaum intelektual Muslim sekarang adalah bekerja keras untuk memberikan kontribusi intelektual dengan merumuskan makna dan isi dari mata rantai itu menjadi sesuatu yang berharga bagi pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk undang-undang negara di bumi Nusantara ini. Karena itu, jangan lagi menoleh ke belakang untuk kemudian larut dalam penyesalan. Lihatlah

⁸⁴¹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik*, h. 5.

⁸⁴² *Ibid*, h. 18.

jauh ke depan dan ambil ancang-ancang untuk maju merebut masa depan yang lebih bermakna.⁸⁴³

Tidak ada gunanya berbicara tentang Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta Pasal 29 UUD 1945, kalau seluruh mata rantai konstitusi itu tidak dielaborasi, dimaknai, dan diaktualisasikan dalam bentuk tata hukum positif untuk mendukung sistem hukum nasional. Jika tidak, agak sulit menggantungkan harapan pada *jaminan* politik hukum parlemen. Padahal berlakunya hukum Islam harus diperjuangkan melalui parlemen.⁸⁴⁴

E. Sumber Autoritatif

“UUPA No 3. Tahun 2006”

Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, merupakan perubahan atas UUPA No. 7 Tahun 1989. Sungguhpun begitu, hampir seluruh pasal-pasal yang ada pada UUPA No. 7 Tahun 1989, masih tetap berlaku, kecuali beberapa ayat yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Namun, cakupan kewenangannya diperluas. Struktur undang-undang itu terdiri atas VII bab, 108 pasal, dengan sistematika dan garis besar isinya sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai Bab III tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV tentang hukum acara, Bab V tentang ketentuan-ketentuan lain, Bab VI tentang ketentuan peralihan, dan Bab VII tentang ketentuan penutup.⁸⁴⁵

⁸⁴³A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet ke-3, h. 129.

⁸⁴⁴Suatu perjuangan yang oleh Kuntowidjoyo disebut sebagai “dari abstrak ke kongret, dari ideologis ke ilmiah, dari subjektif ke objektif. Keterangan lebih lanjut, lihat penjelasan, Kuntowidjoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet ke-3, h. 17-26

⁸⁴⁵Departemen Agama, *Pedoman*, h. 123.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan perubahan atas UUPA No. 7 Tahun 1989, dengan kewenangan yang diperluas, termasuk kewenangan mengadili *perkara pidana Islam*, bahkan dapat diadakan *pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang*.⁸⁴⁶ Dalam salah satu konsiderannya (khususnya huruf [c]), undang-undang ini menimbang, “bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Salah satu perubahan penting dalam UUPA No. 3 Tahun 2006 adalah ketentuan Pasal 2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2,

*“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*⁸⁴⁷

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A,

“Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.”

Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3A UUPA No. 3 Tahun 2006, maka dimungkinkan adanya perkara pidana masuk dalam wilayah Peradilan Agama. Persoalannya adalah ketika perkara pidana masuk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, materi hukum apa yang mau digunakan untuk menyidangkan perkara pidana itu kalau materi hukum

⁸⁴⁶Pasal 2 dan Pasal 3A UUPA No. 3 Tahun 2006.

⁸⁴⁷Pasal 2 UUPA No. 3 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamnya sendiri belum ada yang dijadikan sebagai hukum positif. Akan tetapi, UUPA ini menjadi pintu masuk untuk segera membuat UU hukum pidana Islam untuk dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut, yakni: “Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.”⁸⁴⁸

Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49,

Pasal 49, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syariah.”⁸⁴⁸ Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 50, (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.” Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 52A, Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”⁸⁴⁹

Pasal 49, 50, dan 52 A, merupakan perwujudan dari kewenangan yang diperluas oleh UUPA No. 3 Tahun 2006 ini. Untuk supaya dapat memperoleh gambaran utuh tentang masalah ini, bunyi UUPA No. 7 Tahun 1989, perbandingannya dapat disimak lebih lanjut, sebagai berikut.

Bab I memuat *ketentuan umum* berkenaan dengan pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam bab ini disebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, terdiri atas (1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan (2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Kedua-duanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

⁸⁴⁸ Pasal 3A, UUPA No. 3 Tahun 2006

⁸⁴⁹ UUPA No. 3 Tahun 2006, Pasal 49, 50, dan 52A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu (yang disebut dalam undang-undang itu). Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.⁸⁵⁰ Pembinaan teknis peradilannya, dilakukan oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya, seperti halnya dengan badan-badan peradilan lainnya, dilakukan oleh departemen teknis, yaitu Departemen Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama.⁸⁵¹

Bab II dari undang-undang ini mengatur tentang *Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*.⁸⁵² Pada bagian pertama atau bagian umum disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, yakni seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, yaitu seorang ketua, seorang wakil ketua, hakim tinggi agama sebagai hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Bagian kedua mengatur tentang syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan jurusita Peradilan Agama.⁸⁵³

Disebutkan dalam bagian kedua ini bahwa untuk dapat diangkat ke dalam jabatan yang ada di dalam susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, seseorang harus memenuhi syarat tertentu. Selain syarat-syarat umum yang berlaku bagi pengangkatan pegawai negeri dan pegawai pada badan-badan peradilan lain,

⁸⁵⁰ Departemen Agama, *Pedoman*, h. 125.

⁸⁵¹ *Ibid*, h.126.

⁸⁵² *Ibid*, h. 127.

⁸⁵³ *Ibid*, h. 128.

untuk para pejabat di lingkungan peradilan agama dan syarat khusus, yakni harus beragama Islam. Syarat ini tidak dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi berdasarkan agama,⁸⁵⁴ tetapi diperlukan agar pencari keadilan yang beragama Islam yang datang ke Pengadilan Agama merasa mantap hati dan perasaannya—melaksanakan ibadah—untuk berurusan dengan orang seagama dengannya.⁸⁵⁵ Dan karena sifat pekerjaan yang khusus di lingkungan peradilan agama itu, kecuali untuk *jurusita*, syarat lain yang ditentukan untuk dapat diangkat ke dalam jabatan-jabatan tersebut adalah berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.⁸⁵⁶

Bagian ketiga mengatur tentang sekretaris yang memimpin Sekretaris Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Penitera Pengadilan Agama merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Selain beragama Islam, untuk Pengadilan Agama ia harus berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjanan muda adminitrasi. Untuk Pengadilan Tinggi Agama, berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.⁸⁵⁷

Bab III undang-undang ini mengatur tentang *kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*. Dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan soal kewenangan

⁸⁵⁴ *Ibid*, h. 129.

⁸⁵⁵ *Ibid*, h. 132.

⁸⁵⁶ *Ibid*, h. 133.

⁸⁵⁷ *Ibid*, h. 135.

Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) *perkawinan* (b) *kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*; (c) *wakaf dan shadaqah*.⁸⁵⁸

Dalam penjelasan Undang-undang Peradilan Agama ini, pasal 49 ayat 1 di atas dinyatakan *cukup jelas*.⁸⁵⁹ Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.⁸⁶⁰ Pasal 49 ayat 2 ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu: (1) izin beristri lebih dari seorang, (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia dua puluh tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, (3) dispensasi kawin, (4) pernekadahan perkawinan, (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, (6) pembatalan perkawinan, (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, (8) perceraian karena talak, (9) gugatan perceraian, (10) penyelesaian harta bersama, (11) penguasaan anak, (12) pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya, (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, (16) pencabutan kekuasaan wali, (17) penunjukan orang lain sebagai sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur delapan

⁸⁵⁸ *Ibid*, h. 136.

⁸⁵⁹ *Ibid*, h. 137.

⁸⁶⁰ *Ibid*.

belas tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, (19) pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, (20), penetapan asal-usul anak, (21) putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸⁶¹

Bab IV mengatur tentang *Hukum Acara*. Bagian pertama mengatur hal-hal yang bersifat umum. Di antaranya disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan dalam pengadilan umm kecuali tentang hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama disebutkan dalam bagian kedua undang ini, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai (a) cerai talak yang datang dari pihak suami, (b) cerai talak yang datang dari pihak istri atau suami, dan (c) cerai karena alasan zina.⁸⁶²

Kalau diperhatikan dengan serius proses pemeriksaan sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang diatur dalam undang-undang ini, jelas bahwa undang-undang ini berupaya melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita dengan jalan memberikan hak yang sama kepada istri dalam memajukan gugatan dan melakukan pembelaan di muka pengadilan.⁸⁶³ Untuk melindungi pihak istri, misalnya, gugatan perceraian yang diajukan kepada suami yang menjadi tergugat tidak harus ditujukan kepada pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat seperti yang telah menjadi

⁸⁶¹ *Ibid*, h. 138.

⁸⁶² *Ibid*, h. 339.

⁸⁶³ *Ibid*, h. 140.

prinsip dalam hukum acara perdata umum.⁸⁶⁴ Namun, dalam hukum acara perdata peradilan agama ini, gugatan istri bisa ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (penggugat) yang bersangkutan. Sementara itu perlu dicatat pula bahwa di bagian pertama Bab IV disebutkan pula bahwa tiap penetapan dan putusan peradilan agama (harus) dimulai dengan kalimat *Bismillâhirrahmânirrahîm*, diikuti dengan kata-kata *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁸⁶⁵

Penyebutan kata *Bismillâhirrahmânirrahîm* pada setiap penetapan dan putusan peradilan agama, selain menunjukkan ciri khusus pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang satu ini, kata-kata itu juga dapat dihubungkan langsung dengan kata-kata “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.⁸⁶⁶ Undang-undang dasar 1945 itu, kata-kata tersebut mempunyai fungsi dan makna tersendiri pula bagi hakim dan para pejabat di lingkungan peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya. Melalui kalimat pendek yang mencakup maknanya itu para hakim diingatkan agar selalu teliti dan hati-hati bekerja.⁸⁶⁷ Sebab semua *isi* penetapan dan putusan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh para hakim selalu diawali dengan *asmâ’* Allah itu mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan selalu berada dalam pengawasan Allah Yang Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Prinsip ini, menurut keyakinan seorang Muslim, kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.⁸⁶⁸ Sementara pada bagian lainnya, yakni *bagian ketiga* Bab IV, undang-undang ini menyebutkan soal biaya perkara yang

⁸⁶⁴ *Ibid*, h. 141.

⁸⁶⁵ *Ibid*, h. 142.

⁸⁶⁶ *Ibid*, h. 143.

⁸⁶⁷ *Ibid*, h. 144.

⁸⁶⁸ *Ibid*, h. 145.

diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berjalan berdasarkan asas atau prinsip: “*peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*”⁸⁶⁹

Bab V mengatur tentang *ketentuan-ketentuan lain* mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim dan panitera dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dalam bab ini disebut dengan jelas tugas *jurusita* untuk (a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, (b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang, (c) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, (d) membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. *Jurusita* Pengadilan Agama berwenang melakukan tugasnya di daerah hokum pengadilan yang bersangkutan.⁸⁷⁰

Jurusita tidak ada dalam susunan peradilan agama sebelum undang-undang ini berlaku, sehingga dalam melaksanakan putusannya yang tidak mau diterima oleh para pihak, terutama oleh mereka yang kalah. Pengadilan Agama selalu harus meminta bantuan, dan akibatnya bergantung pada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, karena tidak ada *jurusita* dalam tubuhnya sendiri, putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakannya sendiri, tetapi harus meminta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan ini dalam kepustakaan hukum di Indonesia disebut *fiat eksekusi*.⁸⁷¹

Karena ketiadaan *jurusita*, maka setiap putusan Pengadilan Agama di bidang perkawinan selama ini perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan

⁸⁶⁹ *Ibid*, h. 146.

⁸⁷⁰ *Ibid*, h. 147.

⁸⁷¹ *Ibid*.



Negeri. Dengan undang-undang Peradilan Agama ini, kebergantungan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri yang telah berlangsung selama 108 tahun di Jawa dan Madura diakhiri. Melalui undang-undang ini pula semua aturan yang menentukan kebergantungan peradilan agama kepada peradilan umum telah dihapuskan. Kini, peradilan agama tidak lagi posisinya menjadi seakan-akan “peradilan semu,” tetapi telah benar-benar menjadi peradilan mandiri.⁸⁷²

Bab VI mengatur tentang *ketentuan peralihan*.⁸⁷³ Dalam bab ini disebutkan bahwa (1) semua badan peradilan agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan peradilan agama menurut undang-undang ini. Di seluruh Indonesia, peradilan agama, pada waktu undang-undang ini berlaku, berjumlah 321 buah, terdiri atas 303 Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama. (2) semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan.⁸⁷⁴

Bab VII mengatur tentang *ketentuan penutup*. Dalam bab terakhir ini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang Peradilan Agama ini, semua peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur, dan di bagian lain wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, terciptalah kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama di seluruh Indonesia sebagai penerapan Wawasan Nusantara. Di samping itu, dinyatakan juga bahwa peraturan mengenai pengukuhan yang disebutkan dalam pasal 63 ayat 2 Undang-undang Perkawinan,

⁸⁷² *Ibid.*

⁸⁷³ *Ibid.*, h. 148.

⁸⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang singgung di atas, tidak berlaku lagi. Disbutkan pula dalam ketentuan penutup ini bahwa pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan (juga) oleh Peradilan Agama.⁸⁷⁵

Dengan disahkan Undang-undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Di antaranya adalah dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut.⁸⁷⁶

Pertama, Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Kedua, nama, susunan, wewenang (kekuasaan), dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Ketiga, perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama.⁸⁷⁷

Keempat, lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.⁸⁷⁸

⁸⁷⁵ *Ibid.*

⁸⁷⁶ *Ibid.*

⁸⁷⁷ *Ibid.*

⁸⁷⁸ *Ibid.*, h. 149.

Kelima, terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970), terutama yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Keenam, terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus pula berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.⁸⁷⁹

Merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama, di atas dapatlah disimpulkan bahwa hukum perkawinan dapat dipandang sebagai inti hukum kekeluargaan. Sedangkan hukum kewarisan dapat dipandang sebagai inti hukum kebendaan atau hukum harta kekayaan. Semua ini menjadi wilayah hukum perdata Islam. Adapun hukum pidana Islam, belum tergarap.

F. Sumber Autoritatif

“Kompilasi Hukum Islam”

Dasar hukum “Kompilasi Hukum Islam” (KHI) ada pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991.⁸⁸⁰ Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam, telah menjadi sumber otoritatif bagi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, terutama berkenaan dengan: Buku I tentang Hukum Perkawinan (*Fiqh Munakahat*)), Buku II tentang Hukum Kewarisan (*Fiqh Fara'idl*), dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (*Fiqh Waqaf*).⁸⁸¹

⁸⁷⁹*Ibid*, h. 150.

⁸⁸⁰*Ibid*, h. 173.

⁸⁸¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga Buku dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam diperoleh dari hasil-hasil lokakarya ‘*Alim Ulama Indonesia* yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988.⁸⁸² Lokakarya ini telah menerima dengan baik tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, seperti telah disebutkan di atas. Ketiga buku ini—di samping untuk kebutuhan masyarakat luas—dimaksudkan sebagai “rujukan hukum” oleh para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan setiap perkara yang terkait dengan masalah perkawinan, kewarisan, maupun perwakafan.⁸⁸³ Di sinilah posisi Buku Kompilasi Hukum Islam disebut-sebut oleh para pakar hukum Islam sebagai perwujudan modern dari fiqh *ala* Indonesia.⁸⁸⁴

Fiqh *ala* Indonesia dalam bentuk *Kompilasi Hukum Islam*, memang sudah lama disuarakan oleh para pakar hukum Islam. Salah satu tokoh yang gencar menyuarakannya adalah T.M. Hasby Ash-Shiddiqie (w. 1975 M), Guru Besar Hukum Islam UIN Yogyakarta, pada era 1970-an.⁸⁸⁵ Meskipun pendapatnya ini ditentang habis-habisan oleh sebagian ahli hukum Islam. Argumen yang dibangun oleh para penentang teori Hasby ini memang klasik. Bahwa hukum Islam tidak mengenal batas wilayah dan zaman, sehingga tidak relevan membuat fiqh *ala* Indonesia. Sebab, nanti akan muncul fiqh *ala* Irak, Iran, Mesir, Sudan, Pakistan, India, Turki, Spanyol, dan seterusnya. Jika demikian, wajah Islam yang luas dan menyeluruh itu, berubah menjadi terkotak-kotak dalam batas-batas wilayah yang kecil dan sempit tersebut.⁸⁸⁶

⁸⁸²*Ibid.*

⁸⁸³*Ibid.* h. 174.

⁸⁸⁴*Ibid.*

⁸⁸⁵Nourouzaman Ash-Shiddiq, *Fiqh Indonesia dalam Pandangan Tengku Mohammad Hasby Ash-Shiddiqie*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)

⁸⁸⁶Dalam setiap kuliahnya di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1980-an), Achmad Azhar Basjir, MA, selalu menekankan tentang pentingnya menegakkan prinsip “universalisme” (*kulliyah*) dalam *fiqh*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan tentang hukum Islam adalah hukum yang berlaku universal (menyeluruh) tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu manusia.

Tentu saja, tidak ada yang salah dengan teori ini. Sebab, jika ditelusuri dengan saksama, pastilah kita akan menemukan Islam memang menganut teori universalisme (*kulliyah*) dan parsialisme (*juz'iyah*) secara seimbang. Penggunaan keduanya, berpulang pada kondisi ruang dan waktu yang dihadapi manusia. Berbagai teori dan qaidah fiqh maupun ushul fiqh, yang dirumuskan oleh para *fuqoha*, membuktikan atas kebenaran proposisi ini. Itulah sebabnya, penggunaan kedua teori tersebut selalu disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi manusia. Karena itu, munculnya gagasan *fiqh Indonesia*, bukan saja benar dalam teori, tetapi juga benar dalam kenyataan.⁸⁸⁷ “Tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran,” kata Umar Ibn Khaththab, “jika kebenaran itu tidak dapat dilaksanakan.”⁸⁸⁸ Dan syarat-syarat terlaksananya sebuah kebenaran adalah *kesesuaian* antara apa yang semestinya (*teori*) dengan apa yang senyatanya (*praktik*).⁸⁸⁹

Di sini, Umar ibn Khaththab, Hasby Ash-Shiddiqie (w. 1975 M), bahkan Munawir Sjadzali (w. 2004 M) dengan gagasan *Kompilasi Hukum Islamnya* itu,⁸⁹⁰ jika menggunakan pendekatan filsafat ilmu, maka ketiga tokoh ini sedang menggunakan “teori kebenaran korespondensi,” yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa sesuatu itu dapat dianggap atau dikatakan benar kalau antara pernyataan dengan kenyataan itu “bersesuaian” (berhubungan sebab akibat). Kesesuaian antara

Karena itu, menurut beliau, tindakan menciptakan “fiqh Indonesia” hanya akan membuat ruang lingkup hukum Islam menjadi “sempit” (*juz'iyah*), semata-mata menganut prinsip kedaerahan (*saktarianisme*) yang justru sangat ditentang oleh Islam itu sendiri. Di sini, Achmad Azhar Basjir, memang tidak sendirian, tetapi Hasbi Ash-Shiddiqie juga tidak sendirian dalam memperjuangkan teorinya itu. Buktinya, ada *Kompilasi Hukum Islam*, murni perspektif Indonesia. Karena itu, KHI disebut-sebut sebagai *fiqh Indonesia*. Para kompilator KHI, dapat dipastikan, adalah penganut *madzhab Hasby Ash-Shiddiqie* ini, meskipun mungkin saja mereka tidak mengakuinya.

⁸⁸⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 55.

⁸⁸⁸ Al-Jurjawi, *Hikmat*, h. 169.

⁸⁸⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h.59.

⁸⁹⁰ Munawir Sjadzali, *Pemikiran*, h. 51.

pernyataan (apa yang semestinya) dengan kenyataan (apa yang senyatanya), itulah disebut dengan “kebenaran korespondensi.”⁸⁹¹

Maka, berbicara tentang hukum Islam mana yang paling tepat untuk dipraktikkan di Indonesia—menurut teori kebenaran korespondensi—adalah hukum Islam yang paling *relevan* (sesuai) dengan kenyataan masyarakat Indonesia.⁸⁹² Cara kerja untuk menemukan *kebenaran korespondensi* adalah menggunakan “logika material” (penalaran *induktif*).⁸⁹³ Penalaran induktif inilah melahirkan kebenaran korespondensi seperti dihasilkan oleh Umar ibn Khaththab , Hasby Ash-Shiddiqie (w. 1975 M), maupun Munawir Sjadzali (w. 2004 M).

Adapun cara berpikir dari para penantang ketiga tokoh ini, jelas menggunakan *teori kebenaran koherensi*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa sesuatu itu dapat dianggap atau dikatakan benar kalau antara *pernyataan* dan *simpulan* selalu konsisten (*koheren*). Pernyataan bahwa semua manusia akan mati (pernyataan-1), Plato adalah manusia (pernyataan-2), maka Plato pun akan mati (simpulan).⁸⁹⁴ Antara pernyataan satu (*premis mayor*) dan pernyataan dua (*premis minor*), konsisten dengan simpulan. Inilah yang disebut dengan *kebenaran koherensi*. Cara kerja untuk menemukan *kebenaran koherensi* adalah menggunakan “logika formal” (penalaran *deduktif*).⁸⁹⁵

Penalaran deduktif yang melahirkan *kebenaran koherensi* inilah yang digunakan Achmad Azhar Basjir, dalam berbagai kuliahnya di Fakultas Syari’ah, baik di UIN maupun UII Yogyakarta (1980-1990-an), untuk menghajar teori Hasby Ash-Shiddiqie (w. 1975 M) ini. Karena memang beliau tidak setuju dengan teori *Fiqh ala*

⁸⁹¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, h. 57.

⁸⁹² *Ibid*, h.59.

⁸⁹³ *Ibid*, h. 120.

⁸⁹⁴ *Ibid*, h. 121.

⁸⁹⁵ *Ibid*.

Indonesia, baik yang digagas oleh Hasby Ash-Shiddiqie (w. 1975 M) maupun Munawir Sjadzali (w. 2004 M). Boleh dikatakan bahwa *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sebagai jelmaan dari *Fiqh ala Indonesia*, murni gagasan dari Munawir Sjadzali (w. 2004 M) sewaktu beliau menjadi Menteri Agama.⁸⁹⁶

Buku I tentang Hukum Perkawinan. Buku I berbicara tentang hukum perkawinan, terdiri dari XIX Bab dan 170 Pasal. Bab I, berisikan tentang *ketentuan umum*. Bab II, berisikan tentang *dasar-dasar perkawinan*.⁸⁹⁷ Bab III, berisikan tentang *peminangan*. Bab IV, membicarakan tentang *rukun dan syarat perkawinan*. Bab V, membicarakan tentang *mahar*. Bab VI, membicarakan tentang *larangan kawin*. Bab VII, membahas tentang *perjanjian perkawinan*. Bab VIII, membahas tentang *kawin hamil*. Bab IX, membahas tentang *beristri lebih dari satu orang*. Bab X, membahas tentang *pencegahan perkawinan*. Bab XI, membahas tentang *batalnya perkawinan*. Bab XII, membahas tentang *hak dan kewajiban suami-istri*. Bab XIII, membahas tentang *harta kekayaan dalam perkawinan*. Bab XIV, membahas tentang *pemeliharaan anak*. Bab XV, membahas tentang *hak perwalian*. Bab XVI, membahas tentang *putusnya perkawinan*. Bab XVII, membahas tentang *akibat putusnya perkawinan*. Bab XVIII, membahas tentang *rujuk*. Bab XIX, membahas tentang *masa berkabung*.⁸⁹⁸

⁸⁹⁶ Munawir Sjadzali, oleh banyak kalangan dikenang sebagai Menteri Agama paling produktif dalam melahirkan gagasan besar dengan hasil yang besar pula, di antaranya adalah: *Undang-undang Peradilan Agama* (UUPA) No. 7 Tahun 1989; *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991; dan penyetaraan jenjang pendidikan agama dengan jenjang pendidikan umum, sejak dari MI hingga Perguruan Tinggi. “Ini prestasi luar biasa,” ujar Nurcholish Madjid memuji prestasi yang dicapai Munawir Sjadzali dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, dalam sebuah forum PB HMI di Jakarta, 1992.

⁸⁹⁷ Departemen Agama, *Pedoman*, h. 179.

⁸⁹⁸ *Ibid*, h. 187-214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku II tentang Hukum Warisan. Buku II tentang hukum warisan ini terdiri dari VI Bab dan 44 Pasal. Bab I, berbicara tentang *ketentuan umum*. Bab II, berbicara tentang *ahli waris*. Bab III, berbicara tentang *besarnya bagian warisan*. Bab IV, berbicara tentang *Aul dan Rad*. Bab V, berbicara tentang *wasiat*. Bab VI, berbicara tentang *hibah*.⁸⁹⁹

Buku III tentang Hukum Perwakafan. Buku III tentang hukum perwakafan ini terdiri dari V Bab dan 15 Pasal, ditambah dengan Ketentuan Penutup. Bab I, berbicara tentang *ketentuan umum*. Bab II tentang *fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf*. Bab III, berbicara tentang *tata cara perwakafan dan pendaftaran*. Bab IV, berbicara tentang *perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf*. Bab V, berbicara tentang *ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup*.⁹⁰⁰

Merujuk pada apa yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam ini, dengan jelas sekali bahwa Kompilasi Hukum Islam mencerminkan tentang *fiqh* Indonesia, karena materi-materi hukumnya, bersentuhan langsung dengan karakter budaya dan tradisi masyarakat Islam Indonesia. Sungguhpun demikian, satu hal yang patut disayangkan adalah, kebutuhan atas hukum pidana Islam, belum tersentuh dengan baik di dalam Kompilasi Hukum Islam ini. Meskipun demikian, kehadiran Kompilasi Hukum Islam, memang bertujuan untuk menjawab kebutuhan pada saat itu, yakni menjawab lahirnya UUPA NO. 7 Tahun 1989, sebagai panduan hukum bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dengan 22 kewenangan yang

⁸⁹⁹*Ibid*, h. 215-222.

⁹⁰⁰*Ibid*, h. 258-229.

diperluas, termasuk kewenangan menyidangkan sengketa ekonomi syari'ah bahkan hukum pidana Islam, maka penulis kajian ini berpendapat bahwa pembicaraan tentang upaya kita untuk mewujudkan hukum pidana Islam di Indonesia, bukanlah *autopia*. ***

Wallahu a'lam. []

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.